



**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BALI**

Tahun 2025

LAPORAN KINERJA

PERIODE JANUARI – DESEMBER

JL. MELATI NO. 14, DENPASAR, 80233 | TELP: (0361) 2096942
HP: 08111303737 | www.ombudsman.go.id
EMAIL: bali@ombudsman.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Insan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42, UU nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2017.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran mengenai kinerja, capaian, dan hambatan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, juga sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Laporan ini memuat indikator kinerja dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, laporan ini menjadi salah satu media komunikasi kami kepada pemangku kepentingan dan masyarakat atas kinerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali serta sebagai bahan evaluasi kinerja selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025, sehingga diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja di bulan-bulan berikutnya, agar dapat menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien dalam bekerja.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali terdapat 8 Indikator Perjanjian Kinerja yang dituangkan dan dilaksanakan. Dari 8 Indikator yang dilaksanakan hasil capaian sebagai berikut :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	Lembaga	1	1	100%	Terlaksananya 1 Kegiatan Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik
	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan	Laporan	246	251	102,03%	Tw I : 72 Laporan Tutup Tw II : 50 Laporan Tutup, Tw III : 72 Laporan Tutup, Tw IV : 57 Laporan Tutup Total : 251 Laporan Tutup
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan	1	1	100%	Tersusunnya 1 Laporan IAPS
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	Saran Kebijakan	1	1	100%	Tersusunnya 1 Saran Perbaikan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	Kelompok Masyarakat	1	1	100%	Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Peduli Maladminsitrasi
	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	5	5	100%	Terlaksananya Kegiatan Penilaian 5 Pemerintah Daerah (Opini)
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan	1	1	97,24%	Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 : 633.834.601
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Paket	1	1	98,53%	Pembelian 2 Unit AC 1 PK, 1 Unit Printer, 2 Unit AC 2 PK, dan 2 Unit Laptop

Berikut realisasi anggaran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2025:

Realiasi Pengawasan Pelayanan Publik	Realiasi Anggaran	Realiasi Dukungan Manajemen
99,98%	97,24%	95,49%
Pagu Efektif Rp 253.557.566 Realisasi Rp 253.515.696	Pagu Efektif Rp 651.851.127 Realisasi Rp 633.834.601	Pagu Efektif Rp 398.293.561 Realisasi Rp 380.318.905

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
IKHTISAR LAPORAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. GAMBARAN UMUM	6
1.2. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG	7
1.3. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
BAB II RENCANA KERJA	12
2.1. PERJANJIAN KINERJA	12
2.2. PENETAPAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	16
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
3.3. PEMBERITAAN KABAR PERWAKILAN DAN REALISASI ANGGARAN	89
BAB IV PENUTUP	107
A. Kendala	107
B. Solusi	108
C. Saran	109

IKHTISAR LAPORAN

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali telah berjanji mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Maka dengan itu, kami menyampaikan hasil laporan tahunan 2025 ini sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban dari seluruh Insan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Semoga laporan tahunan ini dapat menjadi acuan perbaikan yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali di tahun-tahun berikutnya demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin optimal dan berkualitas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dalam rangka melakukan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima dan menyelesaikan laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, serta melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin optimal di Provinsi Bali, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali melakukan pengawasan terhadap 9 (sembilan) Pemerintahan Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Pemerintahan Provinsi di mana keseluruhannya melaksanakan pelayanan publik berupa barang, jasa, atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia membagi asisten menjadi 3 (tiga) kelompok keasistenan yang terdiri atas Keasistenan Pencegahan, Keasistenan Penerimaan Dan Verifikasi Laporan Perwakilan, dan Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Terkait pembagian tugas tersebut, Kepala Perwakilan menurunkan kedalam Surat Keputusan Kepala Perwakilan Nomor: 01 – 16 Tahun 2025 Tentang Tentang Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali.

1.2. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

1.2.1 Fungsi

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu khususnya untuk wilayah Provinsi Bali, yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia Pusat.

1.2.2 Tugas

a. Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat

1. Menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan di wilayah kerjanya;
3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya;
4. Melakukan investigasi atas prakarasa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya.

b. Pencegahan Maladministrasi

Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya dan selain tugas yang secara langsung dilakukan setiap Bidang Keasistenan di atas, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali juga dimandatkan untuk:

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan;
2. Membangun jaringan kerja;
3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman.

1.2.3 Wewenang

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali memiliki wewenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor;
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait;
- e. Melakukan kehadiran paksa dalam rangka menyelesaikan Laporan;
- f. Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- g. Menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai penyelesaian laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- h. Menyampaikan saran dan tindakan korektif kepada penyelenggara dalam rangka memperbaiki maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- i. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

1.3. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali terdiri dari:

1.3.1 Keasistenan Pencegahan memiliki tugas:

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
2. Membangun jaringan kerja dengan penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;

3. Melakukan program pencegahan maladministrasi;
4. Melakukan sosialisasi;
5. Melakukan investigasi sistemik;
6. Menyampaikan saran perbaikan kebijakan, penyempurnaan organisasi dan/ prosedur pelayanan publik
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

Sumber Daya Manusia pada Keasistenan Pencegahan terdiri dari 3 orang asisten dan 1 calon asisten yaitu Kepala Keasistenan I Nyoman Agus Santika, dan 3 anggota yaitu Dhuha Fatkhul Mubarak, I Gede Febri Putra serta Dewa Gede Yudiana.

1.3.2 Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) memiliki tugas:

1. Menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

Sumber Daya Manusia pada Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) terdiri dari 3 orang asisten yaitu Kepala Keasistenan Dani Marsa Aria Putri, dan 2 anggota yaitu P Dika Arlita Kurnia Dewi dan Evawaty Situmorang.

1.3.3 Keasistenan Pemeriksaan Laporan (PL) memiliki tugas:

1. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
2. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
3. Melaksanakan ajudikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pemeriksaan laporan;
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan

Sumber Daya Manusia pada Keasistenan Pemeriksaan Laporan terdiri dari 3 orang asisten dan 1 orang asisten yaitu Dewa Made Krisna Adhi Sanjaya sebagai Kepala Keasistenan dan beranggotakan Ida Bagus Kade Oka Mahendra, Dewa Ayu Tismayuni dan 1 calon asisten Anak Agung Sagung Dinarmahari Akasasabda Wirasaba.

1.3.4 Kesekretariatan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Pada Bulan Maret 2025, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali mendapat tambahan 2 orang calon asisten, sehingga jumlah sumber daya manusia di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah sebagai berikut:



Kepala Perwakilan	: 1
Asisten Muda	: 8
Asisten Pratama	: 1
Calon Asisten	: 2
Pegawai Negeri Sipil	: 3
Pramubakti	: 2
Tenaga Pengemudi	: 1
Tenaga Kebersihan	: 1
Tenaga Pengamanan	: 2
Total	: 21

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan mengembangkan Struktur Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali sebagai berikut:



Laman resmi: www.ombudsman.go.id

BAB II RENCANA KERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali terdapat 8 Indikator yang dituangkan sebagai berikut:

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	SATUAN
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1	Lembaga
	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan	246	Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1	Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1	Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1	Kelompok Masyarakat
	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1	Paket

2.2. PENETAPAN KINERJA

2.1.1 Keasistenan Penerimaan Dan Verifikasi Laporan

Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian laporan pada tahapan penerimaan, pencatatan dan verifikasi laporan di wilayah kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Keanggotaan Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan terdiri dari Kepala Keasistenan, Dani Marsa Aria Putri, dan 2 anggota yaitu P. Dika Arlita Kurnia Dewi dan Evawaty Situmorang. Pelaksanaan tugas Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas melakukan verifikasi terhadap 246 laporan dan 1 kegiatan focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan. Pada Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi terhadap 306 laporan dan telah diterima sebanyak 195 Konsultasi. Terdapat kendala dalam pencapaian target verifikasi laporan karena kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu adanya efisiensi anggaran membuat Keasistenan PVL Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali kesulitan untuk melaksanakan PVL *On The Spot*.

2.1.2 Keasistenan Pemeriksaan Laporan

Keasistenan Pemeriksaan Laporan merupakan salah satu keasistenan yang ada di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Berdasarkan Pasal 131 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, Keasistenan Pemeriksaan Laporan memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan pada wilayah kerjanya.

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Perwakilan dan Ketua Ombudsman, Keasistenan Pemeriksaan Laporan bertanggung jawab dalam mewujudkan sasaran kinerja dengan indikator rata-rata penyelesaian laporan 89 hari, persentase penyelesaian laporan 85%, pelaksanaan 1 laporan IAPS dengan rata-rata waktu sebanyak 180 hari, serta penyelesaian laporan masyarakat sebanyak 246 laporan pada tahun berjalan.

Sepanjang tahun 2025, Keasistenan Pemeriksaan Laporan tidak hanya melaksanakan tugas pemeriksaan laporan, tetapi juga turut mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan pelayanan publik. Kegiatan tersebut meliputi pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan harga bahan pokok menjelang dan setelah Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, pengawasan arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, pengawasan Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, pengawasan seleksi PPK di beberapa Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Bali, Seleksi Sipencatar Kemenhub. Tahun 2025 di Provinsi Bali dan Pengawasan Kesiapan Pelaksanaan Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Provinsi Bali. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan layanan publik untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan yang baik.

Dari sisi penanganan laporan masyarakat, Keasistenan Pemeriksaan Laporan menunjukkan perkembangan kuantitatif selama setahun. Pada tahun 2025, tercatat 260 laporan dengan rincian 251 laporan telah ditutup dan 9 laporan masih dalam proses. Perkembangan ini menggambarkan perubahan aktivitas pelaporan Masyarakat.

Metode percepatan penyelesaian laporan terus dioptimalkan melalui focal point dan pertemuan para pihak (fasilitasi/konsiliasi). Pola komunikasi yang dikembangkan dengan terlapor memegang peran penting dalam proses penyelesaian laporan terutama laporan kategori RCO. Pelaksanaan rapat perwakilan secara rutin juga memegang peran penting dalam penyelesaian laporan dimana dalam rapat dilakukan pengawasan dan kordinasi tindak lanjut laporan sehingga tindak melampaui batas baku mutu penyelesaian.

Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali terdiri atas empat orang asisten, yaitu Dewa Made Krisna Adhi Sanjaya sebagai Kepala Keasistenan dan beranggotakan Ida Bagus Kade Oka Mahendra, Dewa Ayu Tismayuni dan Anak Agung Sagung Dinarmahari AW. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali memiliki 11 orang asisten. Dalam penyelesaian laporan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali memiliki pembagian target kinerja kepada seluruh asisten, namun target kinerja penyelesaian laporan lebih banyak tentunya dibebankan kepada keasistenan pemeriksaan laporan terutama Kepala Keasistenan dan Asisten Muda.

2.1.3 Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

Keasistenan Pencegahan mempunyai fungsi pencegahan maladministrasi pelayanan publik di wilayah kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Keanggotaan Keasistenan Pencegahan terdiri dari Kepala Keasistenan I Nyoman Agus Santika, dan tiga anggota Dhuha Fatkhul Mubarak, I Gede Febri Putra serta Dewa Gede Yudiana. Pelaksanaan tugas keasistenan pencegahan di Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas 3 (tiga) sasaran yaitu terselenggaranya Opini Ombudsman "Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik" Tahun 2025, terlaksananya saran perbaikan kebijakan pelayanan publik, serta terlaksananya kegiatan kelompok Masyarakat peduli maladminsitrasi di Perwakilan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali yang dijelaskan dalam beberapa kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target. Untuk tahun 2025, perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	Lembaga	1	1	100%	Terlaksananya 1 Kegiatan Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik
	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan	Laporan	246	2025	102,03%	Tw I : 72 Laporan Tutup Tw II : 50 Laporan Tutup, Tw III : 72 Laporan Tutup, Tw IV : 57 Laporan Tutup Total : 251 Laporan Tutup
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan	1	1	100%	Tersusunnya 1 Laporan IAPS

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	Saran Kebijakan	1	1	100%	Tersusunnya 1 Saran Perbaikan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	Kelompok Masyarakat	1	1	100%	Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Peduli Maladminsitrasi
	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	5	5	100%	Terlaksananya Kegiatan Penilaian 5 Pemerintah Daerah (Opini)
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan	1	1	97,24%	Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 : 633.834.601
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Paket	1	1	98,53%	Pembelian 2 Unit AC 1 PK, 1 Unit Printer, 2 Unit AC 2 PK, dan 2 Unit Laptop

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja organisasi yang mendasarkan pada capaian sasaran strategis pada masing-masing indikator.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Jumlah Akses Masyarakat kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali

Tabel 1
Jumlah Akses Masyarakat Tiap Bulan Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	42
2.	Februari	67
3.	Maret	36
4.	April	33
5.	Mei	43
6.	Juni	51
7.	Juli	41
8.	Agustus	50
9.	September	30
10.	Oktober	121
11.	November	79
12.	Desember	39
Jumlah		633

Pada Tahun 2025, jumlah akses masyarakat yang diterima oleh kantor Perwakilan Bali adalah 633 dalam bentuk: laporan masyarakat, respon cepat Ombudsman, konsultasi Masyarakat, dan tembusan.

Tabel 2
Jumlah Jenis Akses Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Jenis Akses	Jumlah
1.	Laporan Masyarakat	105
2.	Respon Cepat Ombudsman	200

3.	Konsultasi	1
4.	Tembusan	195
Jumlah		633

Pada Tahun 2025, jumlah jenis akses masyarakat terbanyak yang diterima oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Laporan Tipe Respon Cepat Ombudsman dan Konsultasi Masyarakat yakni sebanyak 395 akses. Terdapat perbedaan angka signifikan pada jumlah jenis akses Konsultasi dibandingkan jenis akses lainnya karena beberapa masyarakat masih belum mau melengkapi persyaratan formil dan tidak memenuhi syarat materiel dalam rangka pembuatan laporan masyarakat.

3.2.2 Jumlah dan macam laporan yang diterima, dan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materiel, diteruskan/diproses padatahap pemeriksaan, dan diteruskan/diproses pada tahap resolusi monitoring

Tabel 3

Jumlah Penerimaan dan Penutupan Laporan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2025

Jumlah Penerimaan	Dalam Proses Verifikasi	Jumlah Penutupan Laporan		Jumlah Diteruskan ke Tahap Resmon
		PVL	Pemeriksaan	
306	13	44	249	-

Pada Tahun 2025, terdapat 306 laporan yang diterima dan dilakukan verifikasi. Dari jumlah tersebut terdapat 13 laporan yang sedang dalam proses verifikasi, 44 laporan ditolak di tahapan penerimaan dan verifikasi dan 249 laporan yang diteruskan untuk diproses pada tahap pemeriksaan. Terdapat 44 laporan yang ditolak di tahapan PVL karena beberapa masyarakat masih belum mau melengkapi persyaratan formil dan tidak memenuhi syarat materiel.

Tabel 4

Jumlah Penutupan Laporan di Tahapan Penerimaan dan Verifikasi Laporan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2025

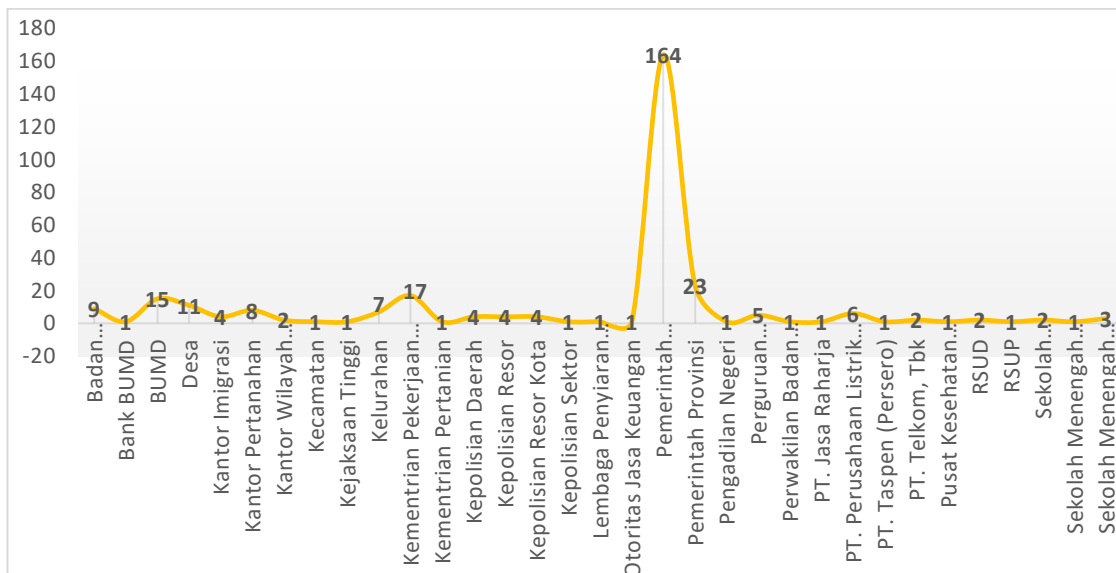
Jumlah Penerimaan di PVL	Jumlah Dalam Proses Verifikasi	Jumlah Penutupan di PVL	Jenis Penutupan Laporan di PVL	
			Tidak Memenuhi Syarat Formil	Tidak Memenuhi Syarat Materiiil
306	13	44	28	16

Pada Tahun 2025, terdapat 306 laporan yang diterima dan dilakukan verifikasi. Dari jumlah tersebut terdapat 13 laporan yang sedang dalam proses verifikasi, 44 laporan ditolak di tahapan penerimaan dan verifikasi dan 249 laporan yang diteruskan untuk diproses pada tahap pemeriksaan. Terdapat 44 laporan yang ditolak di tahapan PVL, yaitu 28 laporan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dan 16 Laporan tidak memenuhi syarat materiel yaitu substansi yang dilaporkan bukan merupakan wewenang Ombudsman Republik Indonesia.

3.2.3 Jumlah Laporan berdasarkan Kelompok Instansi Terlapor, Kelompok Substansi, Produk Pelayanan, dan Jenis Dugaan Maladministrasi

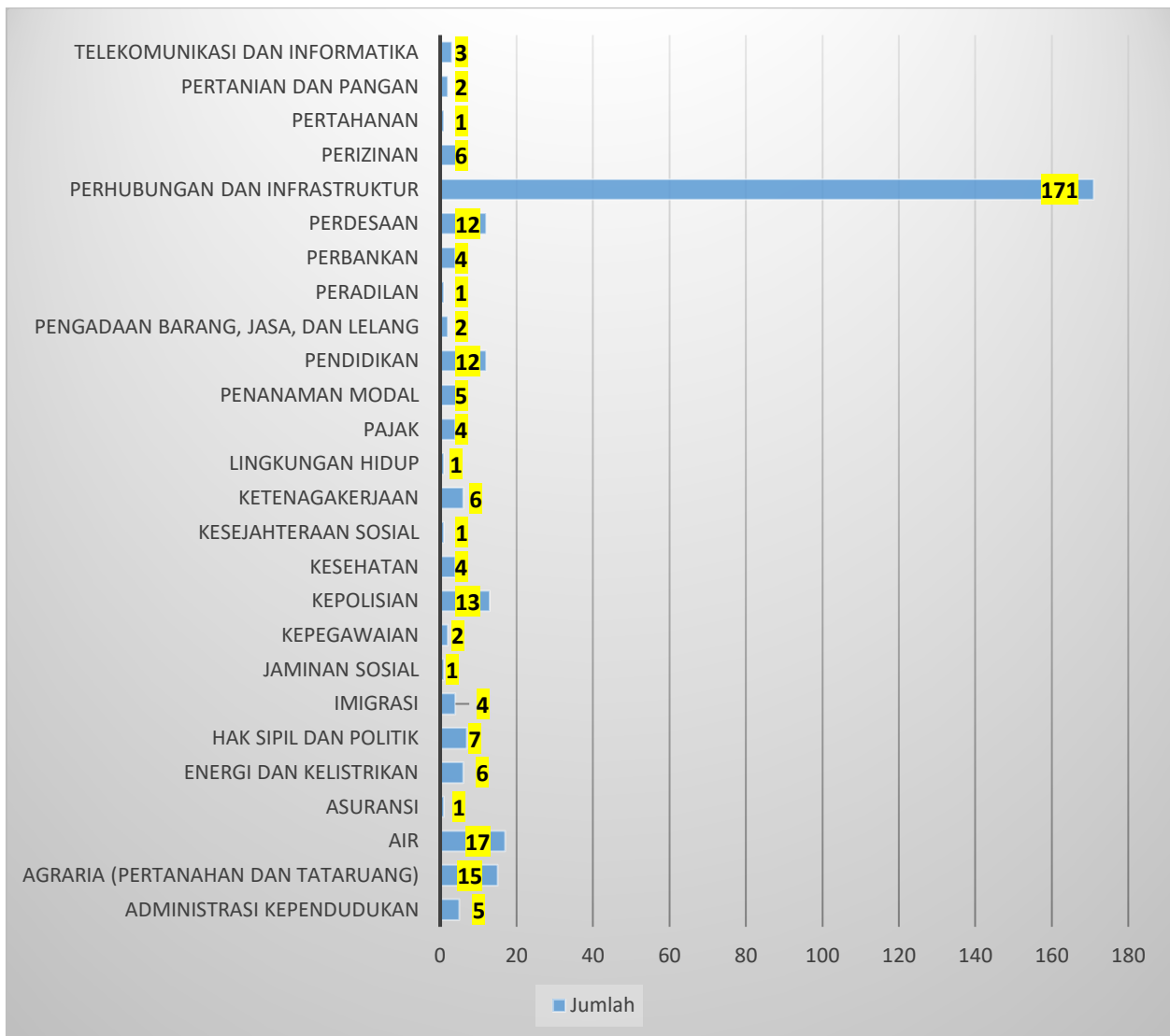
Tabel 5

Jumlah Klasifikasi Instansi Terlapor di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2025



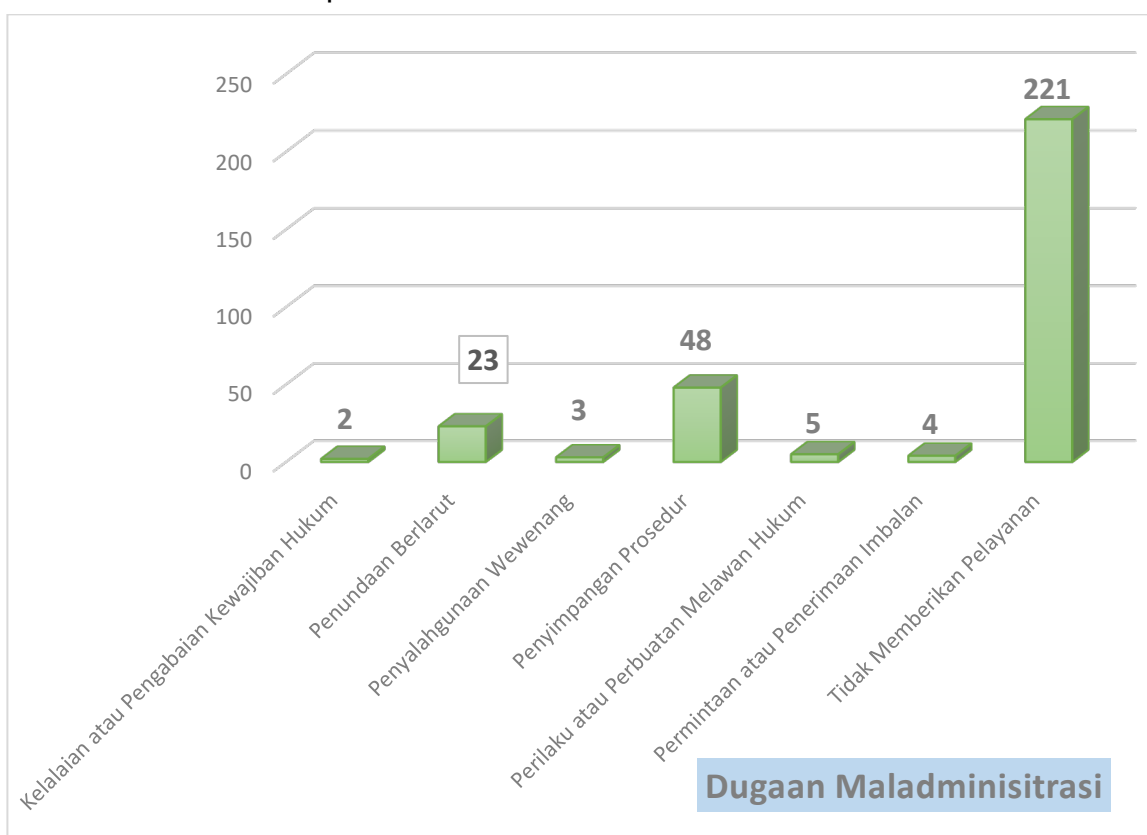
Pada Tahun 2025 kelompok klasifikasi Terlapor terbanyak yang dilaporkan ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten yakni sebanyak 164. Terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan pada jumlah kelompok klasifikasi Terlapor yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan Instansi Terlapor yang paling banyak dilaporkan Masyarakat berasal dari Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Tabel 6
Jumlah Substansi Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2025



Pada Tahun 2025 kelompok substansi laporan terbanyak yang diterima oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Perhubungan dan Infrastruktur yakni sebanyak 171. Terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan pada jumlah kelompok substansi yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan substansi perhubungan dan infrastruktur merupakan substansi yang paling sering diakses dan mudah dilihat oleh masyarakat.

Tabel 7
Jumlah Jenis Dugaan Maladministrasi di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2025



Pada Tahun 2025 kelompok Dugaan Maladministrasi pada laporan terbanyak yang diterima oleh Kantor Perwakilan Bali adalah Tidak Memberikan Pelayanan yakni sebanyak 221 Laporan. Terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan pada jumlah Dugaan Maladministrasi yang disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Bali. Hal ini dikarenakan banyaknya instansi Terlapor yang diduga tidak memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Instansi Terlapor.

3.2.4 Kegiatan PVL *On The Spot*

Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kualitas fungsi pengawasannya, sehingga diharapkan dapat memuaskan pemangku kepentingan Ombudsman terutama masyarakat pengguna pelayanan publik. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, tepat, komprehensif, dan akurat mengenai tugas dan fungsi Ombudsman kepada masyarakat pengguna pelayanan publik. Oleh karena itu kegiatan penyampaian informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui peran Ombudsman dalam penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penerimaan Laporan *On The Spot* dirancang sebagai program 'jemput bola' yang bertujuan untuk meningkatkan proaktivitas fungsi Penerimaan dan Verifikasi Laporan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi mengenai kelembagaan Ombudsman secara umum dan informasi spesifik terkait persyaratan, mekanisme, tata cara dan prosedur penyelesaian Laporan;
2. Memberikan konsultasi terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi penyelenggara layanan;
3. Menerima Laporan masyarakat.

Salah satu hasil atau dampak yang dimungkinkan dari kegiatan 'on the spot' diharapkan akan terjadi proses penyelesaian laporan langsung di tempat kegiatan, bersama-sama dengan pihak penyelenggara pelayanan publik yang dikeluhkan layanannya oleh masyarakat. Dengan demikian kegiatan Penerimaan Laporan dan Verifikasi *On The Spot* diharapkan dapat memberikan solusi secara cepat terhadap permasalahan yang dilaporkan tersebut.

Pada Tahun 2025, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali melaksanakan PVL *On The Spot* dengan lokasi sebagai berikut:

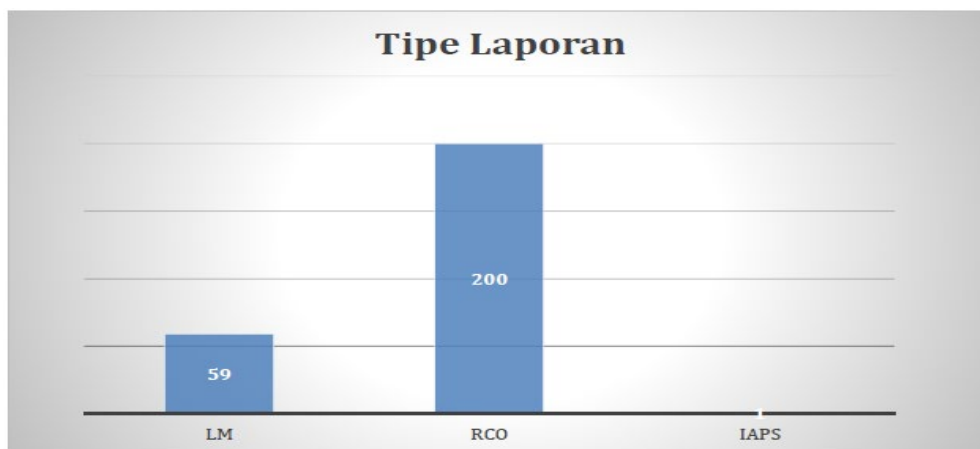
1. 30 September 2025 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jembrana dengan Peserta sejumlah 28 orang yang terdiri dari anggota Organisasi Muhammadiyah Jembrana. Total Konsultasi Masyarakat yang didapatkan sejumlah 28 konsultasi,

2. 1 Oktober 2025 di Kantor Desa Pengambengan Jembrana. Kegiatan ini bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana memiliki Kelompok Binaan UMKM Nelayan dan Pengolah Hasil Ikan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta sejumlah 42 orang. Total Konsultasi Masyarakat yang didapatkan sejumlah 42 konsultasi,
3. 13 November 2025 di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar dengan peserta sejumlah 30 orang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Total Konsultasi Masyarakat yang didapatkan sejumlah 30 konsultasi,
4. 14 November 2025 di Universitas Udayana (Unud) Denpasar dengan peserta sejumlah 37 orang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Total Konsultasi Masyarakat yang didapatkan sejumlah 37 konsultasi.

3.2.5 Program dan Kegiatan pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

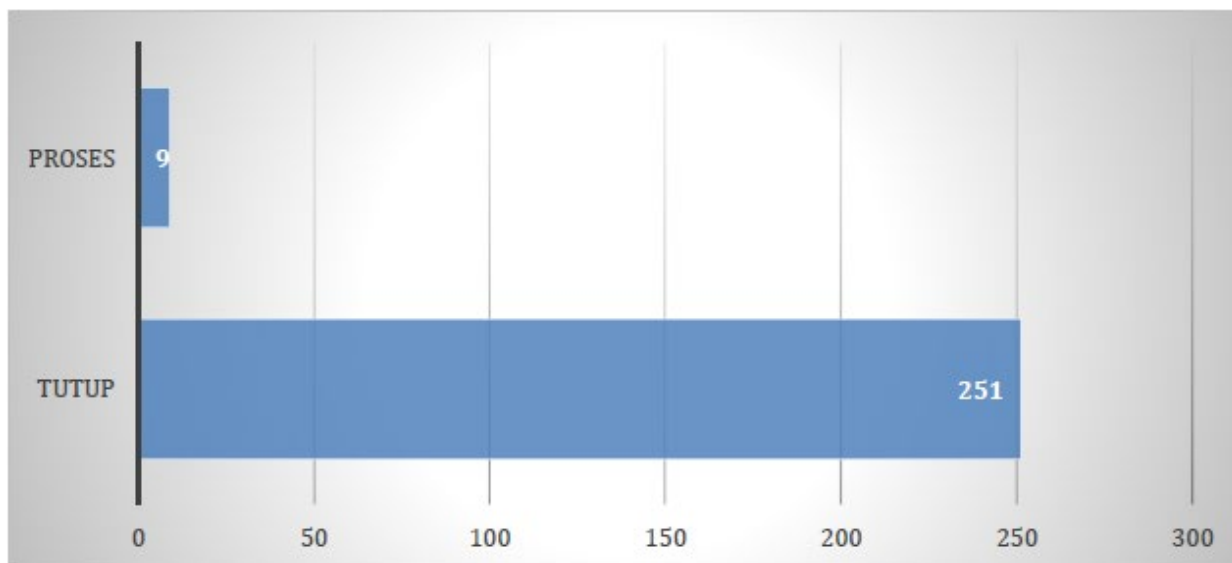
Program dan Kegiatan pada Pemeriksaan Laporan pada Periode tahun 2025 telah melakukan pemeriksaan terhadap 260 Laporan. Adapun secara keseluruhan yakni pada tahun 2025 ini telah dilakukan penyelesaian laporan (tutup) sebanyak 251 laporan.

Berdasarkan tipe laporan sesuai data Sijel untuk periode tahun 2025 sebanyak 59 laporan ditindaklanjuti dengan Laporan Masyarakat, 200 laporan dengan mekanisme RCO (reaksi cepat ombudsman) dan 1 laporan IAPS.



Keterangan : RCO : 200, LM: 59, IAPS: 1

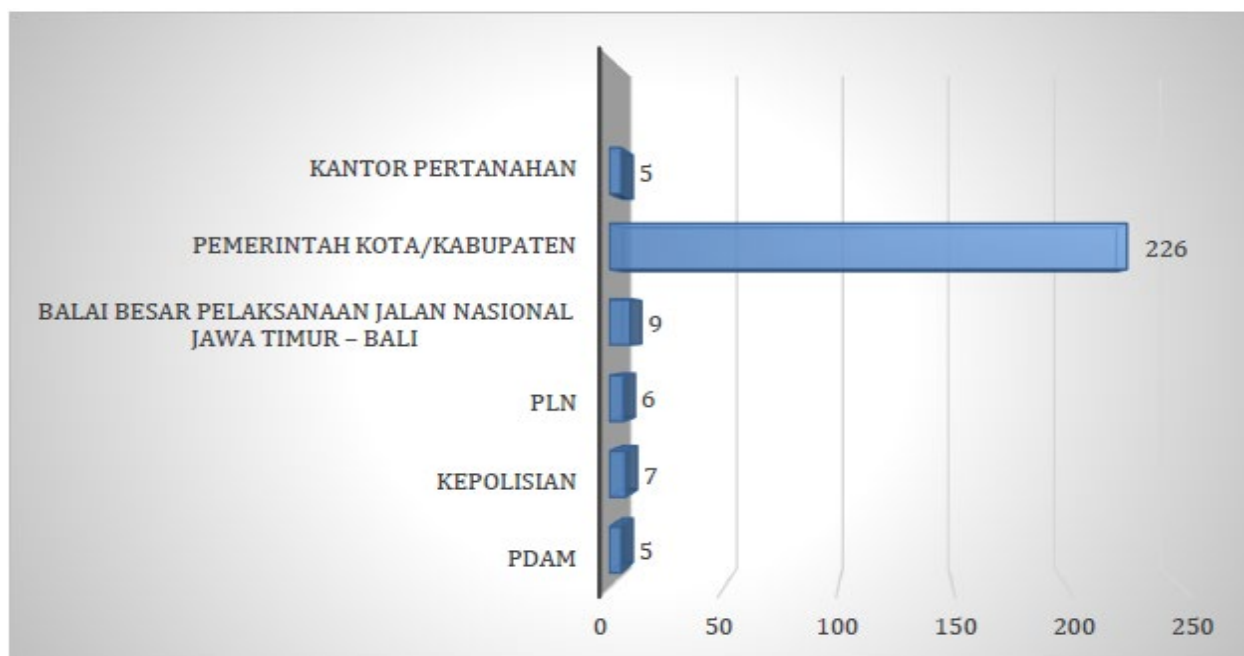
Gambar 1. grafik mekanisme tindak lanjut laporan sepanjang tahun 2025



Keterangan : Laporan tutup : 251, Laporan proses : 9 Gambar 2. Grafik penyelesaian laporan sepanjang tahun 2025

1. Jumlah Laporan Berdasarkan Instansi Terlapor

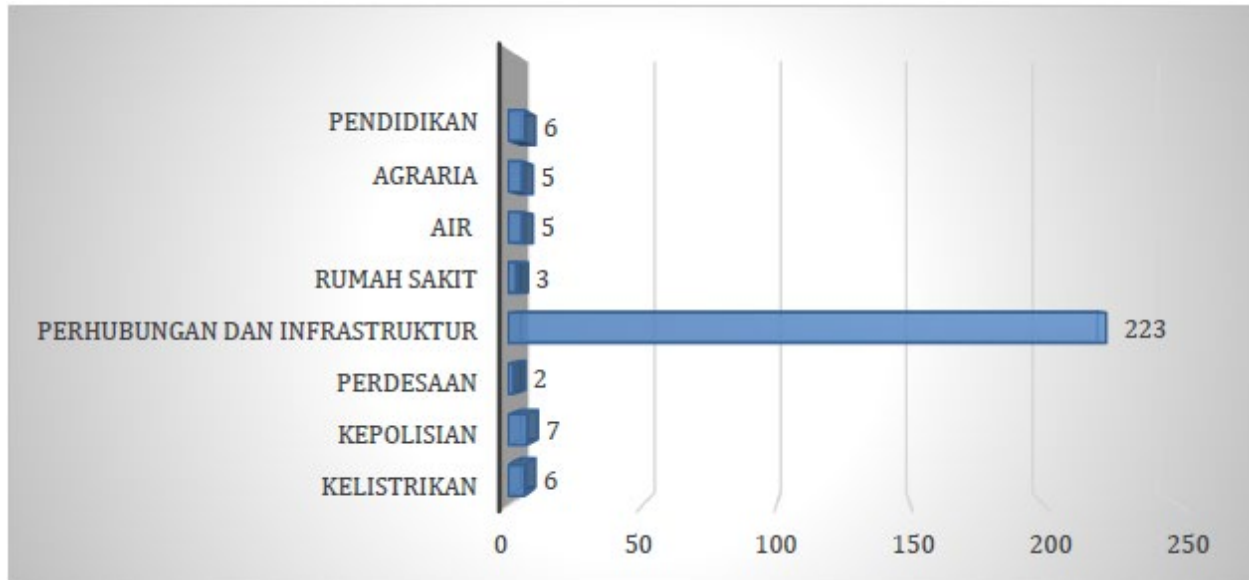
Sesuai data di Perwakilan, berdasarkan instansi Terlapor, Pemerintah Kabupaten/Kota menempati urutan tertinggi yaitu 226 pengaduan dari 260 laporan. Berikut sebaran kelompok instansi terlapor:



Gambar 4. grafik kelompok instansi terlapor sepanjang tahun 2025

2. Jumlah laporan berdasarkan kelompok substansi

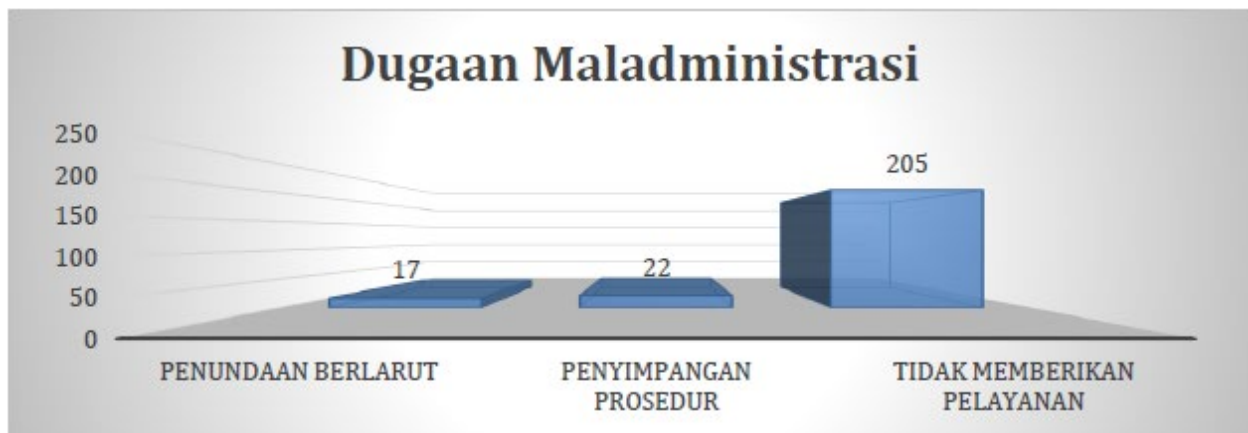
Berdasarkan substansi laporan untuk tahun 2025, Substansi Perhubungan dan Infrastruktur menempati nilai tertinggi yaitu 223 laporan. Hal ini diperoleh dari laporan masyarakat melalui sistem RCO. Berikut sebaran laporan berdasarkan substansi:



Gambar 5. grafik substansi laporan sepanjang tahun 2025

3. Jumlah Laporan Berdasarkan dugaan Maladministrasi

Dalam sepanjang tahun 2025 ditemukan 3 dugaan maladministrasi yang paling dominan dilaporkan dalam laporan masyarakat yaitu Tidak Memberikan Pelayanan sebanyak 205 laporan, Penyimpangan Prosedur sebanyak 22 laporan, dan Penundaan Berlarut sebanyak 17 laporan. Berikut sebaran laporan berdasarkan dugaan maladministrasinya:



Keterangan : Tidak memberikan pelayanan : 205, Penyimpangan Prosedur : 22, Penundaan berlarut : 17

Gambar 6. grafik dugaan maladministrasi sepanjang tahun 2025

4. Isu Publik

Selama kurun waktu sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan dalam penyelesaian laporan dengan cara Permintaan Keterangan Secara Langsung kepada Pelapor/Telapor/Terkait dan melakukan Pengawasan Pelayanan Publik antara lain:

a. Pada Triwulan I ini, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali melakukan beberapa kegiatan pengawasan Pelayanan Publik dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan klarifikasi yang dilakukan pada Triwulan I menggunakan cara permintaan keterangan secara langsung dengan mengundang pihak Pelapor/Telapor/Terkait ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Selain dengan cara tersebut, Tim Pemeriksa menggunakan cara komunikasi via telepon dan whatsapp. Namun hal ini tidak begitu efektif untuk beberapa kasus yang memang mengharuskan Tim Pemeriksa untuk melakukan investigasi lapangan secara langsung, guna memperoleh data dan fakta yang akurat dan benar. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

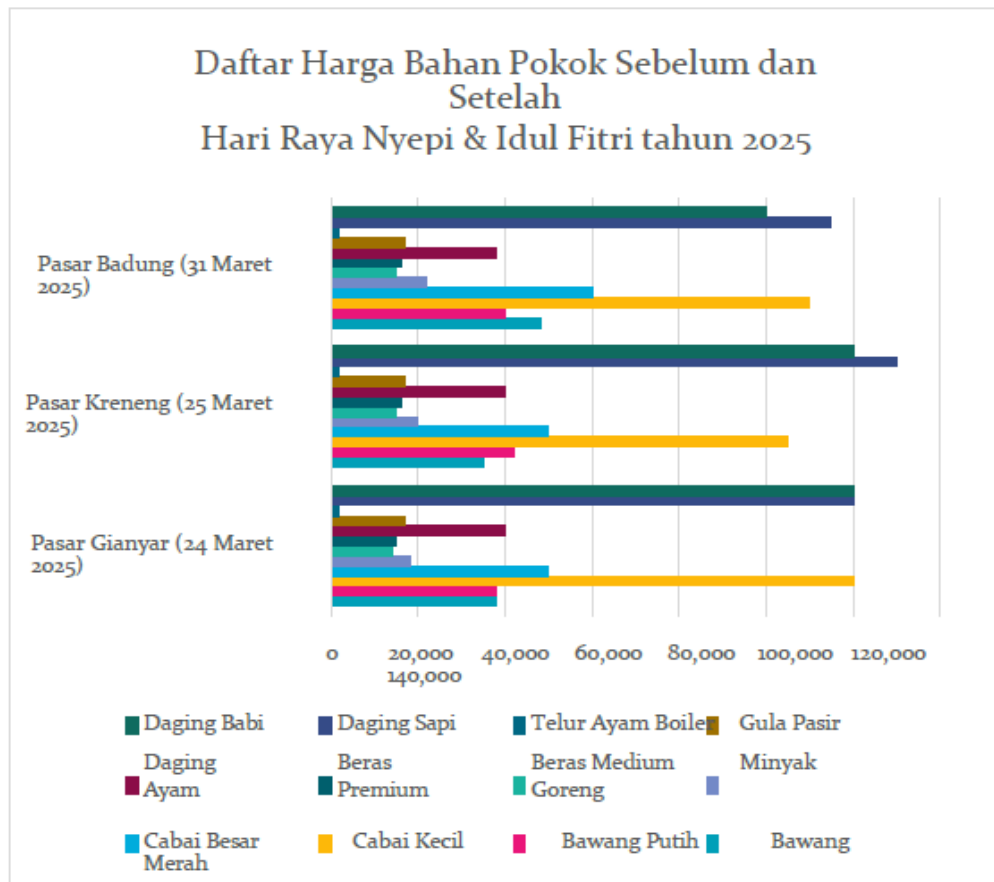
- Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karangasem

Pengawasan dilakukan pada sekolah MTS Negeri Karangasem. Adapun total anak-anak yang diberikan makan sebanyak 544 porsi. Dalam kegiatan MBG di Karangasem dibantu oleh Kodim 1623 Karangasem.

Setelah melakukan pengawasan di MTS Negeri Karangasem, Tim melakukan pengecekan Dapur Sehat di Desa Jasri Karangasem. Adapun di Dapur Sehat inilah makan bergizi gratis dibuat, dalam dapur sehat ini terdiri dari 50 orang yang mengelola dan menyiapkan makan bergizi gratis, perihal jumlah dan indikatif porsi gizi telah diatur oleh Kepala SPPG yakni Ibu Emi, bekerja sama dengan pihak Kodim 1623 Karangasem. Dalam kegiatannya, perhari Dapur Sehat Jasri baru dapat memproses 2841 porsi makan bergizi gratis dengan cakupan sekolah terdekat 0,09 km dan terjauh 5,5 km. Dengan target sekolah PAUD 25, TK 157, SD 1310, SMP 663, SMK 71 dan SMA 612.

- Pengawasan Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025

Pengawasan dilakukan pada beberapa Pasar yakni di Pasar Umum Kabupaten Gianyar, Pasar Kreneng Denpasar dan Pasar Badung Denpasar. Adapun hasil nilai harga bahan pokok sembako sebelum dan setelah Hari Raya sebagai berikut:



- Pengawasan Arus Mudik Idul Fitri tahun 2025

Pengawasan dilakukan pada Pelabuhan Gilimanuk Bali, Pos TMC Pos Pol Adi Pura Polres Tabanan dan Terminal Mengwi Kabupaten Badung,

- Terminal Mengwi Kabupaten Badung (24 Maret 2025) Hasil monitoring sementara ditemukan adanya bus yang menyalahi trayek sehingga mendapat SP. Ditemukan juga bus yang lampu mundurnya tidak berfungsi, safety belt tidak berfungsi. Sebagai tindak lanjut PO yang melanggar akan disampaikan ke Balai untuk kemudian diteruskan ke Hubda,
- Pelabuhan Gilimanuk (27 Maret 2025) Perjalanan dari Denpasar-Cekik, Negara Kabupaten Jembrana ramai lancar dengan durasi 4 jam. Selanjutnya dari Cekik kendaraan pribadi roda 2 dan 4 diarahkan ke buffer zone yaitu lapangan terminal cargo Gilimanuk untuk menunggu giliran masuk ke pelabuhan. Kendaraan dari buffer zone kemudian akan diarahkan melalui jalan perkampungan di sekitar pelabuhan Gilimanuk untuk memecah arus dengan truk besar. Kendala yang dialami yaitu: lamanya durasi menunggu di buffer zone sampai dengan pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, dimana durasinya adalah 7 jam dengan antrian mobil pribadi padat merayap. Setelah melewati perkampungan, kendaraan diarahkan ke areal parkir pelabuhan Gilimanuk. Kendala yang muncul yaitu: karena menyempitnya pintu masuk maka arus kendaraan tersendat. Setelah pemeriksaan tiket penyebrangan, dilakukan pengaturan oleh petugas ASDP Satpel Gilimanuk. Terlihat bahwa pengaturan kendaraan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan arus mudik sebelumnya. Durasi penyebrangan normal yaitu sekitar 45 menit ke Pelabuhan Ketapang. Cuaca mendung berawan. Proses bongkar kapal turun di Pelabuhan Ketapang berjalan dengan baik dan lancar,
- Pos TMC Pos Pol Adi Pura Polres Tabanan (27 Maret 2025) Terpantau kendaraan menuju ke barat (Gilimanuk) mulai ramai lancar, masih didominasi kendaraan roda dua. Dan untuk kendaraan sumbu 3 (truk besar) yg mengarah ke barat diarahkan untuk putar karena untuk saat ini pelabuhan memprioritaskan kendaraan kecil untuk penyebrangan

b. Pada Triwulan II, Tim Pemeriksa tetap melakukan klarifikasi dan pertemuan para pihak terkait penanganan laporan masyarakat, dengan cara melakukan pertemuan di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali maupun melakukan klarifikasi langsung ke Instansi Terlapor. Dan pada awal Juni 2025 terdapat isu publik, di mana ada pemberitaan di berbagai media terkait adanya insiden pengeroyokan sesama tahanan di dalam Rutan Polres Kota Denpasar yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terkait hal itu Kepala Perwakilan Bersama dengan Tim Pemeriksa melakukan sidak langsung ke Rutan Polresta tertanggal 11 Juni 2025 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman memberikan saran perbaikan kepada Rutan Polresta Denpasar yaitu:

- Melakukan perbaikan peletakan CCTV agar lebih mudah untuk dilihat oleh para penjaga;
- Menambahkan bel alarm kegawatdaruratan agar dapat menghubungi penjaga lainnya dengan lebih cepat;
- Melakukan peruntuhan tembok di tempat penjagaan karena mengurangi penglihatan di tempat penjagaan;
- Memberikan pelatihan khusus kepada petugas bagi penjaga tahanan;
- Melakukan pembersihan kaca secara rutin pembatas antara penjaga tahanan dan sel.

c. Pada Triwulan III, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali melakukan beberapa kegiatan pengawasan Pelayanan Publik dikarenakan masih adanya kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan klarifikasi yang dilakukan pada Triwulan III menggunakan cara permintaan keterangan secara langsung dengan mengundang pihak Pelapor/ Terlapor/ Terkait ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Selain dengan cara tersebut, Tim Pemeriksa menggunakan cara komunikasi via telepon dan whatsapp. Namun hal ini tidak begitu efektif untuk beberapa kasus yang memang mengharuskan Tim Pemeriksa untuk melakukan investigasi lapangan secara langsung, guna memperoleh data dan fakta yang akurat dan benar, yakni :

1. Pengawasan Program Makan Bergizi Gratsi (MBG) di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Adapun gambaran secara umum terkait pelaksanaannya sebagai berikut:

- Di Kabupaten Jembrana, pengawasan dilakukan pada SPPG Pendem I, SPPG Pendem II dan SPPG Polres Jembrana. Dalam pelaksanaannya untuk SPPG Pendem I telah berjalan sesuai SOP dan Standar Layanan yang ditargetkan oleh pihak BGN (Badan Gizi Nasional), namun terdapat kendala yakni belum idealnya ruangan di SPPG tersebut karena bahan untuk Ibu Hamil belum dapat tersimpan rapi dan aman. Kemudian temuan di SPPG Pendem II belum dibayarkannya biaya operasional untuk memproses makanan bergizi tersebut sehingga SPPG tersebut sudah siap namun tidak beroperasi, adapun kendala tersebut sudah dilaporkan ke pihak BGN dan Korwil Provinsi MBG oleh ketua SPPG Pendem II, perihal gaji/hak karyawan/relawan SPPG Pendem II masih tetap terbayarkan. Lalu hasil pengawasan di SPPG Polres Jembrana, bahwa SPPG ini sudah sesuai standar dan kebersihannya rutin dicek oleh pihak Dokpol Polres maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana,
- Di Kabupaten Klungkung, pengawasan dilakukan pada SPPG Selat Klungkung dan SDN 1 Akah Klungkung. Dalam pelaksanaannya SPPG Selat masih kurang dalam segi tata ruang proses kerja, seperti tempat pembersihan sisa makanan, ompreng dan alat-alat dapur. Kemudian bangunan yang kurang sesuai, karena dahulu tempat tersebut merupakan sekolah TK. Selain mengawasi pelayanan dan progress di SPPG, Tim Ombudsman juga melakukan pengawasan terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis) langsung di SDN 1 Akah Klungkung. Hasil dilapangan ada beberapa temuan yakni, terbaginya fokus dan tenaga guru untuk mengurus ompreng dari MBG ini, yang harusnya guru fokus kepada peserta didik. Kemudian adanya beban tanggungjawab jika ompreng (alat makan) hilang/rusak menjadi tanggungjawab pihak sekolah. Lalu tidak adanya bimtek atau informasi mengenai teknis kerja dari pelaksanaan MBG ini ke guru atau pihak sekolah. Dan pola koordinasi yang masih bersifat mendadak dan belum terstruktur dan substansif dikarenakan Pemerintah Daerah tidak dilibatkan dalam proses alur kerja dari MBG tersebut,
- Di Kabupaten Karangasem, pengawasan di lakukan pada SD Negeri 6 Subagan dan SPPG Padangkerta Karangasem. Di SDN 6 Subagan

Karangasem ditemukan bahwa tidak adanya alat makan yang disediakan oleh pihak SPPG, yang dimana kebetulan pada hari itu menunya adalah mie berkuah, sehingga siswa terutama kelas I dan kelas II kewalahan untuk menyantapnya dikarenakan menggunakan tangan, belum lagi jika proses cuci tangan sebelum makan siswa yang tidak benar, tentunya bisa terkontaminasi menjadi sumber penyakit bagi siswa, walaupun makanan yang dimakan oleh siswa bergizi dan bersih. Tenaga pendidik yang terbatas tentunya menjadi kewalahan dalam mendampingi anak-anak ketika MBG tersebut berlangsung, diharapkan kedepan adanya petugas khusus yang membantu para guru dalam kegiatan MBG tersebut. Kemudian pengawasan pada SPPG Padangkerta Karangasem, relatif sudah sesuai standar dari pihak BGN syaratkan. Namun kedepan, perlunya komitmen dan cara untuk menjaga target dan sistem kerja yang profesional sehingga tidak adanya kesalahan baik itu dalam proses managerial maupun output produk/makanan yang diberikan bagi peserta didik.

2. Pengawasan seleksi SIPENCATAR Kementerian Perhubungan T.A 2025. Tim Pemeriksa melakukan Pengawasan dan pemantauan penerimaan calon taruna taruni pola pembibitan Kementerian Perhubungan di Poltrada Kemenhub, Samsam, Tabanan. Hal tersebut sesuai nota dinas pimpinan Ombudsman RI kepada Perwakilan Ombudsman RI Prov. Bali. Dalam pengawasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Jumlah peserta yang mengikuti test jasmani pada sesi II Adalah sebanyak 59 orang;
- Dari total 59 orang tersebut peserta tidak ada yang sakit atau cedera baik sebelum atau sesudah mengikuti test jasmani;
- Test jasmani seleksi Sipencatar tahun 2025 ini berbeda dengan seleksi di tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan mulai tahun ini sudah menggunakan sistem ukur dan penghitungan dengan menggunakan mesin, tidak manual seperti dahulu bergantung total pada manusia/panitia (penilaian subjektif).
- Terkait penggunaan sistem telah terverifikasi sebelumnya oleh pihak BPSDM Kemenhub, pihak Poltrada Bali hanya sebagai user saja terkait sistem tersebut;

- Dalam tahapan seleksi Sipencatar, pihak Panitia menyampaikan ada biaya, dan itu sudah sesuai aturan yang berlaku dengan ketentuan;
 - Pada seleksi tahun ini, ada sebanyak 7 peserta yang mengulang tahapan test jasmani yakni pada sesi push up dan sit up, karena peserta merasa dirinya masih dapat lebih banyak untuk dapat point, dan dari panitia mempersilahkan, hanya saja nilai yang dipakai adalah nilai akhir dari test tersebut;
 - Setiap tahapan test ada Berita Acara yang telah disepakati oleh Panitia dan Peserta;
 - Adapun formasi yang dibutuhkan di Provinsi Bali sebanyak 38 orang;
 - Penguji pada tahapan wawancara dilakukan oleh pihak BPSDM Kemenhub dan HIMSI (Himpunan Psikologi) Provinsi Bali;
 - Setiap peserta dialokasikan selama 30 menit;
 - Dalam tahapan seleksi wawancara seluruh peserta hadir;
 - Tiap hasil tahapan seleksi dapat dilihat/dipantau langsung oleh peserta melalui akun masing-masing;
 - Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan oleh pihak BPSDM Kemenhub;
 - Pihak Poltrada Bali Kab. Tabanan berterima kasih kepada pihak Ombudsman karena telah melakukan pengawasan terhadap seleksi Sipencatar Kemenhub tahun ini;
 - Hasil pengawasan seleksi Sipencatar tersebut telah Tim kirimkan ke KU VII Ombudsman RI melalui email dan telah ditembuskan ke email Kepala Perwakilan.
3. Melakukan konsolidasi dengan DPD RI dalam menangani pengaduan masyarakat dan isu publik yang sedang viral/ramai di masyarakat. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan DPD RI an. Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra terkait FGD Evaluasi Pelaksanaan SPMB Tahun 2025 yang bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, kemudian permasalahan dugaan pungli di beberapa sekolah negeri di Provinsi Bali yang pada kegiatan tersebut dilakukan Bersama DPD RI an. Arya Wedakarna dengan menysasar beberapa lokasi di Kabupaten Klungkung, Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar. Tentunya dalam kegiatan tersebut bukan hanya dapat menyelesaikan

permasalahan/pengaduan masyarakat, tetapi sekaligus dapat menjadi media promosi bagi Ombudsman, sehingga publik lebih paham akan keberadaan dan kewenangan Ombudsman RI khususnya di Provinsi Bali.

4. Melakukan pengawasan Pelaksanaan SPMB tahun 2025. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni sebagai berikut :

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 di SDN 17 Dangin Puri Denpasar, Adapun kegiatan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - SDN 17 Dangin Puri menerima 1 rombel (32 org) dengan kuota domisili 25 orang, afirmasi 5 orang, mutasi 2 orang;
 - SDN 17 Dangin Puri masuk ke wilayah IX Kelurahan Denpasar Utara yang melingkupi Dusun Kreneng, Dusun Kreneng Kaja, Dusun Kerta Bhuwana, Lingkungan Bun, Lingkungan Kayumas Kaja;
 - Sekolah telah memperoleh sosialisasi SPMB dari Dinas Pendidikan secara luring di Dinas Pendidikan;
 - Sekolah membentuk panitia dengan jumlah 5 orang;
 - Sekolah tidak membuat pedoman pelaksanaan SPMB, hanya mengikuti juknis (Keputusan Walikota) yang sudah ada;
 - Tidak ada permintaan biaya kepada murid selama pelaksanaan SPMB di sekolah;
 - Sosialisasi kepada orang tua dilakukan melalui daring baik banner maupun media social;
 - Pendaftaran penerimaan dilaksanakan sesuai dengan juknis yang ada, pendaftaran 16-21 Juni 2025;
 - Jumlah daya tampung diumumkan dari sebelum pendaftaran (sesuai juknis);
 - Kanal Pengaduan di sekolah melalui panitia di sekolah;
 - Saat ini siswa yang sudah mendaftar sebagai pilihan pertama sebanyak 21 siswa dari 32 orang daya tampung;
 - Kartu Keluarga maksimal diterbitkan Juni 2024;
 - CPD (calon peserta didik) yang menumpang di KK Keluarga lain tidak memerlukan surat keterangan lainnya;
 - Surat domisili dimungkinkan untuk KK luar Denpasar (setelah KK Denpasar semua masuk dan kuota masih ada);

- Data terkait CPD tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekitar sekolah tidak diberikan;
- Jalur afirmasi diperuntukkan untuk ekonomi tidak mampu dan disabilitas;
- CPD keluarga tidak mampu harus terdata di DTKS (terdata dinsos);
- Sekolah menerima CPD Disabilitas dengan melampirkan dokumen surat keterangan dokter;
- Masa berlaku surat tugas mutasi orang tua maksimal Juni 2024;
- Kuota jalur jika tidak terpenuhi akan dialokasikan oleh dinas, sekolah hanya bertugas melakukan pendaftaran;
- Jalur mutasi anak guru diperlukan tambahan dokumen SK mengajar;
- Terkait pemberitaan di media massa kendala sistem pencetakan pada 16 Juni 2025 tidak dirasakan oleh sekolah ini karena hanya berlangsung pada jam 12.00, dimana pada saat itu tidak ada yang mendaftar;
- Sampai dengan saat ini tidak ada kendala dalam SPMB
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 di SDN 28 Dangin Puri Denpasar, Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :
 - SDN 28 Dangin Puri menerima 2 rombel (64 orang) dengan kuota domisili 51 orang, afirmasi 10 orang, mutasi 3 orang;
 - SDN 28 Dangin Puri masuk ke wilayah IX Kelurahan Denpasar Utara yang melingkupi Dusun Kreneng, Dusun Kreneng Kaja, Dusun Merta Rauh;
 - Sekolah telah memperoleh sosialisasi SPMB dari Dinas Pendidikan secara luring di Dinas Pendidikan;
 - Sekolah sudah membentuk panitia SPMB;
 - Sekolah tidak membuat pedoman pelaksanaan SPMB, hanya mengikuti juknis (Keputusan Walikota) yang sudah ada;
 - Tidak ada permintaan biaya kepada murid selama pelaksanaan SPMB di sekolah;
 - Sosialisasi kepada orang tua dilakukan melalui daring baik banner maupun media social;
 - Pendaftaran penerimaan dilaksanakan sesuai dengan juknis yang ada, pendaftaran 16-21 Juni 2025;

- Jumlah daya tampung diumumkan dari sebelum pendaftaran (sesuai juknis);
- Kanal Pengaduan di sekolah melalui panitia di sekolah;
- Saat ini berdasarkan sistem siswa yang sudah mendaftar 32 siswa dan baru 22 org yang pilihan pertama;
- Kartu Keluarga maksimal diterbitkan Juni 2024;
- CPD yang menumpang di KK Keluarga lain tidak memerlukan surat keterangan lainnya tetapi bila ada yang membawa KK sebelum 1 tahun dengan alasan revisi KK, pihak sekolah meminta agar KK yang pertama dilampirkan ;
- Sesuai juknis tidak ada surat keterangan domisili, namun bagi warga berKTP non-Denpasar bisa diterima setelah KK Denpasar semua masuk dan kuota masih ada;
- Data terkait CPD penyandang disabilitas pada prinsipnya menerima tapi sampai saat ini belum ada;
- CPD keluarga tidak mampu harus terdata di DTKS (terdata dinsos) dan diberikan link untuk melakukan pengecekan;
- Sekolah menerima CPD Disabilitas dengan melampirkan dokumen surat keterangan dokter;
- Masa berlaku surat tugas mutasi orang tua maksimal Juni 2024;
- Kuota jalur jika tidak terpenuhi akan dialokasikan oleh dinas, sekolah hanya bertugas melakukan pendaftaran;
- Jalur mutasi anak guru tidak memerlukan dokumen apapun karena tidak ada pilihan memasukan dokumen pada sistem;
- Sampai dengan saat ini tidak ada kendala dalam SPMB
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di SMAN 1 Denpasar. Adapun hasil kegiatan sebagai berikut:
 - Berdasarkan penelusuran melalui website <https://smabali.spmb.id/>, pada tahun ini SMAN 1 Denpasar membuka 12 rombel dengan masing-masing rombel berjumlah 36 orang sehingga jumlah siswa yang akan diterima sebanyak 432 siswa dengan rincian sebagai berikut: jalur domisili 135 siswa, jalur inklusi 21 siswa, jalur ranking nilai rapor 43 siswa, jalur afirmasi 108 siswa, jalur prestasi akademik 43 siswa, jalur prestasi non akademik olahraga 21 siswa, jalur prestasi non akademik non seni budaya bali 21 siswa, jalur

- prestasi seni dan budaya bali 12 siswa, jalur anak guru 8 siswa, jalur mutase 12 siswa dan jalur prestasi kepemimpinan 8 siswa;
- Wilayah penerimaan murid baru pada SMAN 1 Denpasar melingkupi Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Utara dan Denpasar Selatan;
 - SMAN 1 Denpasar telah memperoleh sosialisasi SPMB dari Dinas Pendidikan secara daring dan luring. Pedoman pelaksanaan SPMB pada SMAN 1 Denpasar mengikuti Petunjuk Teknis (Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03- A/Hk/2025) yang sudah ada. Sesuai dengan juknis, SMAN 1 Denpasar membentuk panitia Penerimaan Murid Baru. Sekolah juga telah melakukan sosialisasi secara tatap muka ke 36 SMP yang berada di Denpasar. Pendaftaran penerimaan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada yaitu Pendaftaran dilaksanakan tanggal 30 Juni – 4 Juli 2025. Jumlah daya tampung diumumkan dari sebelum pendaftaran (tertera pada website <https://smabali.spmb.id/>). SMAN 1 Denpasar juga membuka kanal pengaduan di sekolah;
 - SMAN 1 Denpasar tidak melakukan permintaan biaya kepada murid selama pelaksanaan SPMB;
 - Pada jalur domisili, SMAN 1 Denpasar tidak menerima Kartu Keluarga yang diterbitkan di bawah 1 tahun;
 - Jalur afirmasi diperuntukkan untuk ekonomi tidak mampu dan disabilitas. CPD keluarga tidak mampu harus terdata di DTKS (terdata dinsos). Sekolah menerima CPD Disabilitas dengan melampirkan dokumen surat keterangan dokter;
 - Pada jalur mutasi, surat tugas mutasi orang tua maksimal 1 tahun.
 - Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di SMAN 4 Denpasar. Adapun hasil kegiatan sebagai berikut:
 - Pada tahun ini SMAN 4 Denpasar membuka 12 kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 36 orang sehingga jumlah siswa yang akan diterima total sebanyak 432 siswa dengan rincian sebagai berikut: Jalur Domisili 30%, Jalur Afirmasi 30% (keluarga kurang mampu dan inklusi/penyandang disabilitas 5%), Prestasi 35% yang di bagi menjadi (1. Jalur Rangking Nilai Rapot 10%, 2. Jalur Prestasi Akademik 10%, 3. Jalur Prestasi Olah Raga 5%, 4. Jalur Prestasi Seni, Budaya, Bahasa atau Nonakademik Non Bali

Lainnya 5%,. 5. Jalur Prestasi Seni Budaya Bali 3%, 6. Jalur Kepemimpinan 2%) dan Jalur Mutasi 5% (perpindahan orang tua/wali dan anak guru 2%)

- Sekolah sudah melakukan sosialisasi melalui tatap muka langsung, website, spanduk dan papan pengumuman yang di tempel di sekolah;
- Pada Jalur Domisili: Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB, (Min. Tgl. terbit KK 30 Juni 2024), Rapor semester 1 s.d. 5, dan Surat Keterangan akumulasi nilai raport 1 s.d. 5;
- Pada Jalur Inklusi: surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog, kartu penyandang disabilitas da KK;
- Pada Jalur Afirmasi: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KK;
- Pada Jalur Prestasi Nilai Rapor: Rapor semester 1 s.d. 5, dan Surat Keterangan akumulasi nilai raport 1 s.d. 5 dan KK;
- Pada Jalur Prestasi Akademik, Nonakademik Olahraga, Seni, Budaya, Bahasa Atau Bidang Nonakademik Nonbali Lainnya: Sertifikat / piagam prestasi / piagam penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (tanggal 30 Juni 2022 s.d. 29 Juni 2025), ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/nonajang, pengesahan dari Dinas terkait / Panitia Penyelenggara Surat keterangan hasil kurasi dari Pusprenas mendikdasmen, Daftar Peserta (ajang kompetisi /nonkompetisi), dan
- Pada Jalur Prestasi Nonakademik Seni Budaya Bali: Sertifikat/piagam prestasi/piagam penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tgl. Pendaftaran murid baru (Tgl. 30 Juni 2022 s.d. 29 Juni 2025), ajang kompetisi / ajang nonkompetisi / nonajang, pengesahan dari Dinas terkait / Panitia Penyelenggara Surat keterangan hasil kurasi dari Pusprenas mendikdasmen, Daftar Peserta (ajang kompetisi / nonkompetisi), dan KK;
- Pada Jalur Prestasi Nonakademik Kepemimpinan: Pengalaman kepengurusan sebagai ketua OSIS atau ketua organisasi

- kepanduan, dokumen penetapan kepengurusan sebagai ketua OSIS, atau ketua organisasi kepanduan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, dan KK;
- Pada Jalur Mutasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali: Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Maksimal tgl. 30 Juni 2024), SKPWNI dari Dinas Dukcapil, Surat Keterangan Tempat Tinggal.;
 - Pada Jalur Anak Guru: Surat penugasan orang tua sebagai guru dari Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar, dan Kartu Keluarga;
 - Panitia SPMB menyediakan kanal pengaduan tatap muka yang di layani sebanyak 4 orang dan melalui whatsapp;
 - Operator SPMB di SMAN 4 Denpasar di bagi menjadi 3 ruangan yaitu Operator Jalur Domisili, Jalur Perstasi, Jalur Afirmasi dan jalur mutasi di satu ruangan. Operator bertugas untuk memeriksa dan memvalidasi dokumen yang di upload oleh calon siswa dan akan menginformasikan ke calon siswa jika ada dokumen yang salah atau kurang lengkap. Kendala masih belum ditemukan hanya saja masih banyak kesalahan teknis dari calon siswa seperti upload dokumen pada kolom yang tidak sesuai, scan dokumen yang tidak terbaca atau dokumen mereng sehingga menyulitkan operator untuk mengecek berkas calon siswa tersebut. Operator akan menginformasikan kepada calon siswa agar mengupload Kembali berkas/atau dokumen yang sesuai.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2025 di SMAN 5 Denpasar. Adapun hasil kegiatan sebagai berikut :
 - Sekolah telah memperoleh sosialisasi mengenai penyelenggaraan SPMB 2025 dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
 - Sekolah telah membentuk panitia Penerimaan Murid Baru;
 - Pedoman pelaksanaan SPMB di sekolah yang mengikuti juknis Dinas Pendidikan Provinsi Bali/pedoman dari Kemendikdasmen;
 - Tidak terdapat permintaan biaya ke murid selama pelaksanaan SPMB di sekolah;
 - Sekolah sudah melakukan sosialisasi melalui tatap muka langsung, spanduk dan papan pengumuman yang di tempel di sekolah.

Sekolah juga melakukan sosialisasi di sekolah dengan mengundang sekolah, lingkungan, serta perbekel yang berada di zona Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Kuta;

- Pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan pada tanggal 30 Juni - 4 Juli 2025, pengumuman pada tanggal 12 Juli 2025;
- Pada saat pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru telah diumumkan jumlah ketersediaan daya tampung;
- Panitia SPMB menyediakan kanal pengaduan tatap muka di sekolah;
- Penerimaan murid baru kemungkinan hanya ada I gelombang karena jumlah pendaftar telah melebihi kuota murid. Tidak ada istilah gelombang II;
- Pada Jalur Domisili: Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB, (Min. Tgl. terbit KK 30 Juni 2024), Rapor semester 1 s.d. 5, dan Surat Keterangan akumulasi nilai raport 1 s.d. 5. Tidak dimungkinkan untuk menggunakan Surat Keterangan Domisili;
- Pada Jalur Inklusi: surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog, kartu penyandang disabilitas da KK;
- Pada Jalur Afirmasi: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KK;
- Pada Jalur Prestasi Nilai Rapor: Rapor semester 1 s.d. 5, dan Surat Keterangan akumulasi nilai raport 1 s.d. 5 dan KK;
- Pada Jalur Prestasi: Sertifikat / piagam prestasi / piagam penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB selama masa bersekolah SMP (tanggal 30 Juni 2022 s.d. 29 Juni 2025), ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/nonajang, pengesahan dari Dinas terkait / Panitia Penyelenggara Surat keterangan hasil kurasi dari Pusprenas Mendikdasmen, Daftar Peserta (ajang kompetisi /nonkompetisi). Dilakukan proses verifikasi dan validasi atas keabsahan sertifikat prestasi. Penetapan bobot nilai pada jalur prestasi tidak didasarkan pada peringkat akreditasi sekolah asal. Tidak ada tes terstandar

yang dilaksanakan pada jalur prestasi. Pengumuman jalur prestasi akan mencantumkan poin prestasi;

- Pada Jalur Mutasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali: Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Maksimal tgl. 30 Juni 2024), SKPWNl dari Dinas Dukcapil, Surat Keterangan Tempat Tinggal. Jika kuota jalur mutasi tidak terpenuhi maka kuota akan disesuaikan oleh system;
- Pada Jalur Anak Guru: Surat penugasan orang tua sebagai guru dari Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar, dan Kartu Keluarga;
- Operator SPMB di SMAN 5 Denpasar ditempatkan dalam satu ruangan. Operator bertugas untuk memeriksa dan memvalidasi dokumen yang di upload oleh calon siswa dan akan menginformasikan ke calon siswa jika ada dokumen yang salah atau kurang lengkap. Kendala: masih ada kesalahan teknis dari calon siswa seperti upload dokumen rapor semester 1-5 yang filenya besar jadi terkadang gagal terupload. Dinas Pendidikan Provinsi Bali memberi arahan agar diverifikasi saja tanpa menunggu upload rapor. Namun terjadi permasalahan ketika sudah diverifikasi tapi ternyata sekolah salah menginput jumlah nilai rapor semester 1-5. Operator akan menginformasikan kepada calon siswa agar datang ke sekolah membawa berkas/atau dokumen yang sesuai.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2025 di SMPN 1 Denpasar. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :
 - Pernah ada sosialisasi dari dinas terkait SPMB, sosialisasi via langsung, dari penyusunan juknis sudah koordinasi dengan dinas, sebanyak empat kali;
 - Penunjukan operator dari sekolah, ada 2 kali pelatihan operator sekolah, ada grup Whatsapp operator dengan telkom dinas dan sekolah;
 - Sekolah membentuk panitia SPMB dengan SK, yang berisi susunan ketua, operator, sekretaris, bendahara, konsumsi;
 - Dari juknis yang dibuat oleh dinas, sekolah langsung ambil dari Juknis tersebut;

- Tidak ada permintaan biaya;
- Sosialisasi ke calon orangtua siswa melalui K3S dan memuat di media sosial sekolah, pemasangan poster, dll;
- Kanal pengaduan sekolah membuat, ada narahubung yang bisa dihubungi, tercantum di juknis, pak ketua, wakil, dan koordinator operator;
- Verifikasi langsung oleh sekolah, jika ada KK baru maka akan dikonfirmasi oleh sekolah. Jika keluarga lain maka akan kami hubungi untuk konfirmasi;
- Tidak dimungkinkan surat domisili kecuali prestasi kelas 4-5 dan kelas 6 semester 1;
- Pencocokan data siswa kurang mampu waktu akhir dicocokkan dengan dinas;
- Jalur afirmasi untuk kurang mampu dan disabilitas, tahun lalu ada 1 siswa yang difabel, difabel fisik pakai kursi roda. Difabel ada surat keterangan dokter dan komunikasi dengan orangtua siswa;
- Jalur prestasi ada batasan waktu sertifikatnya yakni 3 tahun terakhir 2023-2025 ada verifikasi keabsahan sertifikat. Dicocokkan dengan event yang diadakan, porjar dipakai panduan. Juara internasional juga dilakukan pengecekan;
- Akreditasi sekolah asal tidak mempengaruhi hasil dengan jalur prestasi;
- Jalur mutasi menetapkan masa berlaku SK setahun untuk anak guru dan pegawai di satuan masing2 dibuktikan dengan SK mengajar dan tugas;
- Semua jalur jika sisa maka akan masuk jalur domisili semuanya;
- Terbuka 11 kelas 440 siswa;
- Juknis tidak ada kendala, by system;
- Jalur afirmasi tidak bisa mendaftar sendiri, kesulitan tidak punya gadget, tidak bisa ke internet;
- Setelah SPMB apakah ada permintaan uang komite di SMPN 2 Denpasar? Pihaknya menjawab bahwa pihak Komite akan menanyakan apa keperluan sekolah, nanti dari pihak komite yang akan menyampaikan ke orangtua siswa, dan pihak komite yang mengatur pembiayaannya. Karena penggunaan BOS saat ini ketat. Orangtua siswa tidak menentukan jumlah;

- Untuk siswa afirmasi maka tidak akan dibebani biaya dll, bahkan mendapatkan uang pulsa.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di SMPN 3 Denpasar. Adapun hasil kegiatan pengawasan sebagai berikut :
 - Sekolah telah memperoleh sosialisasi mengenai penyelenggaraan SPMB 2025 dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui zoom dan media sosial IG Disdik Provinsi Bali;
 - Sekolah telah membentuk panitia Penerimaan Murid Baru;
 - Pada tahun SMPN 3 Denpasar menetapkan kuota siswa sebanyak 320 yang akan dibagi menjadi 8 kelas. Adapun penyebarannya adalah: Jalur domisili 138 (kuota awal) + 45 (siswa kuota jalur afirmasi); jalur prestasi 40 (akademik 20, nonakademik 20); Jalur Afirmasi 64 kuota awal, namun terisi hanya 19 sehingga siswa 45 dimasukkan ke jalur domisili; Jalur mutasi 16
 - Pedoman pelaksanaan SPMB di sekolah yang mengikuti juknis Dinas Pendidikan Kota Denpasar/pedoman dari Kemendikdasmen;
 - Tidak terdapat permintaan biaya ke murid selama pelaksanaan SPMB di sekolah;
 - Sekolah sudah melakukan sosialisasi melalui tatap muka langsung, spanduk dan papan pengumuman yang ditempel di sekolah, media sosial Instagram, Facebook;
 - Pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan pada tanggal 7-9 Juli 2025 (jalur afirmasi), tanggal 10-11 Juli 2025 (jalur mutasi dan afirmasi), tanggal 14-16 Juli 2025 (jalur domisili) tanggal 17-19 Juli 2025 (pendaftaran ulang);
 - Pada saat pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru telah diumumkan jumlah ketersediaan daya tampung, kuota 320 siswa/8 kelas;
 - Panitia SPMB menyediakan kanal pengaduan tatap muka di sekolah dan melalui media elektronik IG, FB, atau kontak Whatsapp;
 - Penerimaan murid baru kemungkinan hanya ada 1 gelombang karena jumlah pendaftar telah melebihi kuota murid. Tidak ada istilah gelombang II;
 - Pada Jalur Domisili: Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB. Tidak dimungkinkan untuk menggunakan Surat Keterangan Domisili;

- Pada Jalur Inklusi: surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog, kartu penyandang disabilitas dan KK;
- Pada jalur afirmasi : tidak ada pendaftar/ calon siswa disabilitas, namun hanya calon siswa dari keluarga tidak mampu; Kartu DTSEN dari Kemensos dan Surat pernyataan DTKS yang diterbitkan oleh dinsos;
- Pada Jalur Prestasi: Sertifikat / piagam prestasi / piagam penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB selama masa bersekolah SMP), ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/nonajang, pengesahan dari Dinas terkait / Panitia Penyelenggara Surat keterangan hasil kurasi dari Pusprenas Mendikdasmen, Daftar Peserta (ajang kompetisi/nonkompetisi). Dilakukan proses verifikasi dan validasi atas keabsahan sertifikat prestasi. Penetapan bobot nilai pada jalur prestasi tidak didasarkan pada peringkat akreditasi sekolah asal. Tidak ada tes terstandar yang dilaksanakan pada jalur prestasi. Pengumuman jalur prestasi akan mencantumkan poin prestasi;
- Pada Jalur Mutasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali: Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB, SKPWNI dari Dinas Dukcapil, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- Pada Jalur Anak Guru: Surat penugasan orang tua sebagai guru dari Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar, dan Kartu Keluarga;
- Operator SPMB di SMPN 3 Denpasar ditempatkan dalam satu ruangan (10 orang operator dan 10 orang pendamping operator, total 20 orang) . Operator bertugas untuk memeriksa dan memvalidasi dokumen yang di upload oleh calon siswa dan akan menginformasikan ke calon siswa jika ada dokumen yang salah atau kurang lengkap. Selain itu terdapat 10 orang verifikator lapangan untuk melakukan crosscheck alamat (crosscheck lapangan hanya dibutuhkan ketika calon siswa tetap ingin mendaftar disekolah meskipun sudah ditolak 2 kali, namun alamat tidak sesuai maka akan dilakukan *crosscheck*;

- Masih ada kesalahan teknis dari calon siswa seperti upload dokumen seperti file yang terlalu besar;
- Masih banyak orang tua murid yang mencoba daftar langsung ke SMPN 3 Denpasar walaupun sudah disosialisasikan terkait aturan pendaftaran;
- Hingga saat ini Posko Pengaduan SMP N 3 telah menerima konsultasi dan pengaduan. Terkait dengan Pengaduan baru diterima 1 pengaduan terkait dengan penerimaan siswa jalur prestasi yang memiliki nilai prestasi yang sama. Dalam aduan ini SMP N 3 Denpasar telah menyampaikan dasar aturan yang meloloskan siswa tersebut (Nilai dan jarak rumah siswa) sesuai dengan juknis yang berlaku kepada Pengadu dan Dinas Pendidikan Kota Denpasar.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di Kabupaten Tabanan. Adapun hasil kegiatan pengawasan sebagai berikut :
 - Kegiatan dilaksanakan di Dinas Pendidikan, banyak orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya lewat jalur domisili (diluar KK/KTP Tabanan) karena untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan penginputan oleh operator kemudian mendistribusikan ke SMP yang dekat dengan domisili sesuai KK;
 - Dalam kegiatan verifikasi KK langsung dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kab. Tabanan yang membuka pos pelayanan dan hasil verifikasi berupa surat keterangan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - Bila Surat Keterangan dari Dukcapil sudah keluar, maka orang tua pindah ke ruang sebelah untuk dilakukan input data oleh operator dan nanti orang tua akan mendapatkan notifikasi bahwa anaknya diterima di SMP;
 - Pihak Dukcapil dalam kegiatan ini cukup teliti by sistem (membawa pc dan langsung membuka database SIAK dan printer) jadi tidak bisa memanipulasi data KK;
 - Untuk di Tabanan sudah ada 183 siswa yang mengajukan permohonan sekolah keluar Tabanan;
 - Pemantauan SMPB di SMPN 6 Tabanan, kegiatan pendaftaran sepi di sekolah karena dilaksanakan secara online dan bila ada orang tua yang ingin mendaftarkan ke sekolah langsung maka

pihak sekolah akan bantu mendaftarkan. Berdasarkan informasi dari Dinas pendaftaran juga bisa dilakukan di SD asal siswa. Untuk tahun ini ada penambahan 2 rombel dari 4 rombel menjadi 6 rombel, 32 orang/rombel;

- Kemenag Tabanan, untuk sekolah dibawah pendidikan islam Kemenag Tabanan terdapat 14 Madrasah (MI/SD : 4, MTs/SMP : 6 dan MA/SMA : 4) sedangkan untuk RA/TK : 7;
- Untuk sekolah dibawah Kemenag Tabanan dikelola masyarakat/swasta tetapi kalender pendidikan mengikuti pemerintah. Untuk PPDB dikelola oleh Yayasan/Sekolah masing-masing namun tetap memberikan data kepada Kemenag diakhir PPDB.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Adapun hasil monitoring pasca pengumuman SPMB tingkat SMA/SMK Provinsi Bali sebagai berikut :
 - Disdikpora Provinsi Bali telah membuka posko pengaduan SPMB sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
 - Permasalahan yang ditemui di posko yaitu CPD (calon peserta didik) yang diterima namun tidak pada pilihan pertama dan CPD yang tidak diterima di sekolah manapun;
 - Masyarakat yang menyampaikan keluhan diminta untuk mengisi formulir sebagai bahan evaluasi;
 - Saat ini dinas sedang mengidentifikasi data sekolah yang masih kosong dan CPD yang tidak mendapatkan sekolah;
 - Masih banyak sekolah yang kosong karena tidak ada CPD yang memilih sekolah tersebut;
 - Saat ini sedang diadakan rapat dengan DPRD terkait permasalahan tersebut untuk menentukan kebijakan terhadap sekolah yang masih kosong dan CPD yang tidak mendapatkan sekolah.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 di SMAN 11 Denpasar dan SMAN 12 Denpasar. Adapun hasil monitoring pasca pengumuman SPMB tingkat SMA/SMK Provinsi Bali sebagai berikut :
 - Kedua sekolah masih banyak memiliki kuota kosong (SMAN 11 kuota 288 terisi 62, SMAN 12 kuota 216 terisi 40);

- Sampai dengan saat ini kepala sekolah menyampaikan belum ada arahan dari dinas);
- Jika tidak ada penambahan siswa operasional sekolah akan sangat minimal;
- Diakui sosialisasi terhadap sistem ppdb online ini sangat minim sampai di Masyarakat;
- Harapannya segera ada pembukaan jalur optimalisasi terhadap sekolah- sekolah yang kuotanya masih tersedia.
- Temuan Khusus,
 1. Pada tanggal 30 Juni 2025, pihak Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Denpasar melakukan koordinasi langsung ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut pihak Dinas Sosial menyampaikan dalam penerbitan Surat Perintah Layanan (SPL) terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi harus melalui verifikasi terlebih dahulu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) apakah terdata atau tidak, karena yang menjadi dasar penerbitan SPL untuk SPMB Jalur Afirmasi adalah DTKS. DTKS digunakan untuk memverifikasi bahwa warga tersebut tidak mampu sesuai dengan kesepakatan bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar serta dapat juga menggunakan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan hasil musdes/muskel. Per tanggal 18 Juni 2025 menu view DTKS hilang di website SIKS-NG menjadi view DTSEN dan menyebabkan petugas pelayanan (POBIA) pada Dinas Sosial Kota Denpasar tidak dapat memverifikasi warga yang mengajukan permohonan SPL terkait SPMB Jalur Afirmasi.

Informasi yang didapatkan pada grup Pengelola SIKS-NG dalam penerbitan surat keterangan sesuai DTSEN, Kemensos menyampaikan untuk menunggu 1 hari, sedangkan kondisi saat ini dalam pengajuan SPMB Jalur Afirmasi untuk Sekolah Menengah Atas terakhir tanggal 04 Juli 2025 dan untuk Sekolah Menengah Pertama terakhir 11 Juli 2025, oleh karena itu sesuai dengan kondisi saat ini menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di

Lingkungan Kementerian Sosial POBIA hanya dapat melayani Desil 1 - 5 menurut DTSEN.

Kriteria Desil 1 - 10 pada dasarnya satu populasi dibagi menjadi 10 bagian diurut dari yang terendah. Terkait dengan DTSEN dalam Penentuan Desil 1 – 10 dengan melakukan ground check atau proses verifikasi ke lapangan sesuai dengan 39 variabel. Dalam penentuan Desil 1 – 10 bukan hanya di rangking sesuai dengan penghasilan tetapi sesuai dengan kriteria dari 39 variabel tersebut yang memiliki bobot dan skornya masing-masing.

Tidak ada definisi pasti untuk penentuan desil. Desil 1 di Kota A dengan Desil 1 di Kota B bisa berbeda. Terkait mekanisme atau metode pemeringkatan menjadi wewenang BPS (Badan Pusat Statistik) di Kantor Pusat.

Di Kota Denpasar menggunakan DTSEN untuk Sekolah Menengah Pertama Jalur Afirmasi, apabila terdapat warga yang memang tidak mampu dan terdata dalam DTSEN Desil 6 – 10 pimpinan mengambil kebijakan untuk dapat dibuatkan SPL dengan dilakukannya assessment oleh petugas desa/kelurahan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu, foto dan hasil assessment. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas Jalur Afirmasi dalam penerbitan SPL hanya dilayani apabila terdata dalam DTSEN Desil 1 – 5 sesuai hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Tim Asisten Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali melakukan monitoring pasca pengumuman SPMB tingkat SMA/SMK Provinsi Bali. Adapun temuannya sebagai berikut :

- Permasalahan yang ditemui di posko yaitu CPD (calon peserta didik) yang diterima namun tidak pada pilihan pertama dan CPD yang tidak diterima di sekolah manapun;
- Masih banyak sekolah yang kosong karena tidak ada CPD yang memilih sekolah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2025 pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali melakukan koordinasi langsung ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali terkait masih

adanya kuota kosong di SMA Negeri serta masih adanya calon peserta didik (CPD) yang belum mendapatkan sekolah. Pihak Dinas menyampaikan bahwa telah dilakukan koordinasi kepada pihak DPRD Bali dan Gubernur Bali pada tanggal 12 Juli 2025, yang Dimana pihaknya sampai saat ini telah melakukan upaya optimalisasi daya tampung di Sekolah SMA Negeri yang masih memiliki kuota, dan mengupayakan calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah agar mendapat sekolah dengan mengutamakan nilai rapor dan jarak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pada Triwulan IV, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali melakukan beberapa kegiatan pengawasan Pelayanan Publik, yakni:

1. Pengawasan Program Makan Bergizi Gratsi (MBG) di Kabupaten Buleleng. Adapun gambaran secara umum terkait pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Di SPPG Kaliuntu 2 melakukan distribusi MBG baru sebanyak 1.500 porsi untuk 2sekolah termasuk yakni TK Bhayangkari dan SMAN 1 Singaraja;
 - SPPG belum melakukan distribusi MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita;
 - Kepala SPPG selalu menekankan terkait dengan kebersihan kepada seluruh relawan dimana nantinya akan terdapat 47 relawan, 1 akuntan dan 1 ahli gizi serta 1 ka sppg plus 1 security;
 - Berita Acara diberikan oleh SPPG setiap hari ke sekolah;
 - Sisa makanan ompreng selalu dipisahkan karena akan ada yang mengambil untuk makanan ternak;
 - Tempat pencucian ompreng terpisah dengan tempat pencucian alat makan;
 - Pemasok bahan sebagian besar berasal dari daerah sekitar;
 - Yayasan yang menaungi SPPG ini adalah pihak Bhayangkari Kepolisian Polres Buleleng;

- Di SMAN 1 Singaraja, pihak Sekolah akan membentuk Tim Pelaksana MBG di SMAN 1 Singaraja, yang terdiri dari beberapa komponen pegawai;
 - MBG berjumlah 1135 porsi dengan pembagian untuk kelas X, XI dan XII;
 - Sekolah sudah memberikan informasi agar siswa/i membawa alat makan sehingga siswa/i tidak kesulitan saat makan;
 - Berita Acara Penerimaan Paket Makanan Program MBG diberikan oleh SPPG setiap hari;
 - Sisa makanan dari MBG akan dibuang oleh siswa pada Teba Modern yang telah disiapkan pihak sekolah, sehingga ketika Ompreng MBG di kembalikan ke Dapur SPPG tidak ada lagi limbah sisa makanan.
2. Pelaksanaan kegiatan Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri yang terdaftar dengan Nomor Register: 0252/IN/X/2025/DPS mengenai dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam Pelayanan Pengesahan Pajak Kendaraan Tahunan dimana terdapat perbedaan persyaratan antara pelayanan di Kantor Samsat dengan pelayanan inovasi lainnya:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, maka disimpulkan bahwa ditemukan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam Pelayanan Pengesahan Pajak Kendaraan Tahunan dimana terdapat perbedaan persyaratan antara pelayanan di Kantor Samsat dengan pelayanan inovasi lainnya;
 - Bahwa pada tanggal 3 November 2025 telah disampaikan tindakan korektif sebagai berikut: a. Tim Pelaksana Layanan Samsat di Provinsi Bali melakukan evaluasi standar pelayananan pengesahan pajak kendaraan bermotor tahunan. b. Tim Pelaksana Layanan Samsat di Provinsi Bali melakukan penyamaan persepsi kepada seluruh kantor samsat (UPTD) terkait standar pelayananan pengesahan pajak kendaraan bermotor tahunan baik pelayanan di dalam Gedung maupun pelayanan inovasi, c. Tim Pelaksana Layanan Samsat di Provinsi Bali melakukan publikasi standar pelayananan pengesahan

pajak kendaraan bermotor tahunan yang terbaru sesuai dengan hasil evaluasi.

- Bahwa telah dilakukan monitoring pelaksanaan tindakan korektif pada tanggal 1-5 Desember 2025 dimana diperoleh kesimpulan bahwa tindakan korektif telah dilaksanakan sepenuhnya;
 - Bahwa Terlapor telah memberikan tanggapan dari tindakan korektif yang disampaikan pada tanggal 4 Desember 2025 melalui surat nomor B.32.000/7591/P2RPD/Bapenda dimana seluruh tindakan korektif telah dilaksanakan dengan melampirkan bukti dukung berupa:
 - a. Berita Acara nomor 6891 Tahun 2025 terkait hasil rapat tim Pembina Samsat Provinsi Bali;
 - b. Keputusan Bersama Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor tentang Persyaratan Administrasi Dalam Pelayanan Pengesahan Pajak Kendaraan Tahunan;
 - c. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 129 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.
 - Laporan dinyatakan selesai dan ditutup menurut Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 huruf b Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.
3. Melakukan pertemuan para pihak terkait laporan Masyarakat nomor registrasi 0247/LM/X/2025/DPS terkait Dugaan tidak memberikan pelayanan Tidak Memberikan Pelayanan Oleh Lurah Banyuning dalam Penandatanganan Surat Penyanding Tanah dalam Pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Ibu Pelapor. Dalam pertemuan para pihak yang dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Pemkab Buleleng. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Pihak Inspektorat yakni Irban I dan Irban 5 beserta jajaran, kemudian dari pihak Lurah Banyuning, pihak Dinas PUTR Kab. Buleleng, Pihak Badan Pertanahan Kab. Buleleng dan pihak Desa Adat Banyuning Buleleng, dalam pertemuan tersebut terdapat hasil bahwa :
- Bahwa pada 18 Oktober 2024 Lurah Banyuning sudah menandatangani berkas usulan pensertifikatan tanah milik pelapor, tetapi setelah diketahui bahwa objek yang akan disertifikatkan

tersebut adalah sepadan Pantai. Maka Lurah Banyuning menunda memberikan pelayanan tanda tangan tersebut;

- Bahwa kami Desa Adat tidak pernah mengintervensi Lurah dalam memberikan pelayanan tandatangan, dan terkait permasalahan ini sudah pernah dimediasi pada 7 November 2024. Desa adat juga ingin menata Pantai sebagai wewidangan Pura Segara untuk kepentingan umat;
 - Dinas PUTR Kab. Buleleng, kami sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 2 kali dan sudah ditindaklanjuti melalui surat pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021 – 2041;
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akan menjawab surat Desa Adat Banyuning Nomor: 069/DA-Bany/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perihal: Permohonan Tanah Sempadan Pantai Palemahan Pura Segara Gede Desa Adat Banyuning;
 - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali memberikan saran agar Kelurahan Banyuning Menyusun Standar Pelayanan.
4. Melakukan konsolidasi dengan DPD RI dalam menangani pengaduan masyarakat dan isu publik yang sedang viral/ramai dimasyarakat. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan DPD RI an. Arya Wedakarna. Tentunya dalam kegiatan tersebut bukan hanya dapat menyelesaikan permasalahan/pengaduan Masyarakat, tetapi sekaligus dapat menjadi media promosi bagi Ombudsman, sehingga publik lebih paham akan keberadaan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia khususnya di Provinsi Bali.
 5. Pelaksanaan Pengawasan Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam rangka memastikan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya terkait dengan keselamatan, keamanan dan mobilitas masyarakat selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru, maka Ombudsman Republik Indonesia merasa perlu untuk melakukan pengawasan sebagaimana tugas dan wewenangnya. Atas hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan sebagaimana hal dimaksud khususnya dalam hal: 1. Memastikan kelengkapan fasilitas layanan dan kesiapan

personel yang ada di setiap Pos Keamanan, Pos Pelayanan, Transportasi, dan Pusat Keramaian. 2. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan. 3. Koordinasi intensif dengan kepolisian, pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan kondusifitas di daerah masing-masing:

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 di Gereja Protestan (GPIB) Majelis Jemaat Maranatha Denpasar. Dalam pemantauan Tim bertemu dengan Ibu Amanda Atalia selaku pengurus Gereja. Adapun kegiatan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - Terdapat pengaturan arus masuk dan keluar jemaat yang jelas;
 - Telah disiapkannya upaya pencegahan dan penanganan overcrowding saat prosesi ibadah dengan mengadakan empat (4) kali sesi ibadah bagi jemaat. Walaupun upaya tersebut dilakukan langsung, belum tertulis juknisnya;
 - Telah dilakukan koordinasi lintas Lembaga dalam hal pelaksanaan Hari Natal tahun ini, yang melibatkan pihak Kepolisian, Pecalang, Kepemudaan Ansor, TNI, Desa Adat dan Kelurahan;
 - Telah dibuatkannya jalur evakuasi bagi jemaat yang melakukan ibadah Natal;
 - Terdapat petugas khusus yang memantau kepadatan jemaat yang ditempatkan didepan pintu masuk Gereja dengan menggunakan Checker, untuk menghitung jumlah jemaat yang masuk ke Gereja;
 - Jumlah daya tampung jemaat Gereja (GPIB) Maranatha Denpasar sebanyak 1.600 orang.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 di Posko Terpadu Nataru Terminal Ubung Kota Denpasar. Dalam pemantauan Tim bertemu dengan Bapak Ipda. I Made Mahardika (Kasubnit Turjawali) Satuan Polresta Denpasar dan Bapak Ida Bagus Yoga Hendarta (Kabid Angkutan Dishub. Kota Denpasar) beserta jajaran. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :
 - Dalam Upaya mencegah overcrowding pihak Kepolisian dan Dishub Kota Denpasar telah melakukan Upaya dan pemetaan pada titik yang rawan menjadi overcrowding. Untuk di Kepolisian

dilakukan oleh Satlantas dan untuk di Dishub dilakukan oleh Bidang Dal Ops;

- Untuk Tahun ini pengawasan tetap dilakukan secara aktif terutama di sekitar Posko dan tempat keramaian di Kota Denpasar. Dan tahun ini dari pihak Pemkot. Denpasar tidak melaksanakan Pesta Kembang Api saat menyambut Tahun Baru 2026;
- Rambu-Rambu dan sarana lalu lintas yang terutama di titik rawan kecelakaan masih berfungsi normal dan jika sarana lalu lintas tersebut tiba-tiba tidak berfungsi, dapat langsung melaporkan ke 110 atau kanal pengaduan ProDenpasar;
- Jika di Terminal Ubung dan sekitarnya terjadi khususnya permasalahan/peristiwa seperti kecelakaan, penemuan barang mencurigakan dan Tindakan kriminalitas, pihak Kepolisian Posko Terpadu akan mengantensi awal dan melaporkan ke Posko Induk yakni di Polresta Denpasar. Khusus untuk jumlah personal Kepolisian di Posko Terpadu Terminal Ubung sebanyak sepuluh (10) orang dengan sistem kerja maks. 12 jam/harinya;
- Dalam Posko Terpadu terdapat beberapa unsur Instansi seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, BPBD Kota Denpasar dan Jasa Raharja;
- Perihal mitigasi bencana, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas instansi dan siap jika terjadi bencana (banjir) di sekitar area pengawasan Tim Posko Nataru Terminal Ubung Denpasar;
- Pada Posko telah tersedia Tim Kesehatan yang terdiri dari tiga (3) orang yakni 1 Dokter, 1 Perawat dan 1 Driver Ambulance;
- Pada Posko juga telah tersedia Toilet, Ruang Laktasi, HT, Rompi Reflektif, APAR, P3K dan Ambulance.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 di Bandara Ngurah Rai Badung Bali. Adapun hasil kegiatan sebagai berikut :
 - Arus lalin menuju bandara ramai lancar, namun ada beberapa truk yang parkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan penyempitan jalan;
 - Jalur masuk bandara lancar tanpa antrian, ketersediaan parkir cukup;

- Pihak kepolisian angkasa pura dan karantina juga sudah membuat Posko Nataru yang dilengkapi dengan pos kesehatannya;
- Waktu kedatangan pesawat sampai dengan saat ini terjadwal dengan baik tanpa adanya delay;
- Kondisi di terminal kedatangan cukup ramai namun masih terkendali.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 di Kabupaten Tabanan. Adapun hasil kegiatan sebagai berikut :
 - Tim berkoordinasi dengan Polres Tabanan terkait kesiapan PAM, layanan darurat 110 dan pengisian instrumen was NATARU dari Ketua Ombudsman RI. Lanjut memantau/melihat ruang 110 SPKT dan ruang Traffic Management Center Sat Lantas Polres Tabanan;
 - Kemudian pada pukul 15.00 - 18.30 Wita patroli motor bersama Wakil Bupati Tabanan, Kapolres, Ketua DPRD dan Forkpinda Tabanan, start Polres Tabanan. Dalam giat ini tim melaksanakan:
 - Kunjungan ke Gereja Immaculata Tabanan, guna memastikan jalannya ibadah berjalan lancar serta mengecek kesiapan anggota yang bertugas. Diluar gerja disiapkan pos pengamanan unsur Kepolisian, TNI, Kesehatan, Pol PP;
 - Kunjungan ke Gereja Immanuel Tabanan, guna memastikan jalannya ibadah berjalan lancar serta mengecek kesiapan anggota yang bertugas. Diluar gerja disiapkan pos pengamanan unsur Kepolisian, TNI, Kesehatan, Pol PP;
 - Pos Pengamanan/pemantauan lalulintas di Pos Polisi Adipura Tabanan, tim mengecek kesiapan sapsras dan personil. Dalam giat PAM tsb terdiri dari unsur, POLRI, TNI, Kesehatan, BPBD, PLN, Dishub, Pol PP.

e. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penyelesaian Laporan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali pada tanggal 26 November – 27 November 2025 bertempat di Hotel Grand Palace Sanur Denpasar. Adapun tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dan meningkatkan kapasitas Asisten Perwakilan Ombudsman Republik

Indonesia Provinsi Bali. Adapun Gambaran dari kegiatan tersebut yakni sebagai berikut :

- Kegiatan dibuka oleh Ibu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali an. Ibu Ni Nyoman Sri Widhiyanti, yang dimana dalam sambutannya menyampaikan bahwa apresiasinya kepada Tim Riksa 2025 atas capaian dan kinerjanya, semoga dengan adanya Evaluasi ini dapat menjadi wadah untuk Asisten menjadi lebih baik dan profesional. Kemudian acara dilanjutkan pemaparan oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan an. Dewa Made Krisna Adhi Sanjaya. Dalam pemaparannya menyampaikan terkait capaian dan realisasi Tim Riksa 2025 yang telah dicapai selama tahun 2025. Setelah pemaparan, dilanjutkan terkait rencana tindaklanjut penanganan pengaduan yang masih berproses di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali;
- Kemudian setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan pemberian materi tentang Enhancing Complaint Management & Investigation Skills oleh asisten Dewa Ayu Tismayuni. Dilanjutkan penyampaian materi Mediasi dan Konsiliasi oleh asisten Ida Bagus Kade Oka Mahendra;
- Dilanjutkan penyampaian materi dari Bidang Sekretariat dan penyampaian hasil Rakernas oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali;
- Kegiatan dilanjutkan terkait Pembahasan Strategi Percepatan Penutupan Laporan dan Evaluasi Penanganan Laporan Tahun 2025, yang dimana dalam hal ini perlu adanya strategi khusus dalam penanganan pengaduan khususnya saat adanya blokir anggaran atau regulasi anggaran sehingga menghambat proses penanganan tindaklanjut laporan Masyarakat;
- Kegiatan dilanjutkan Penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Kerja sekaligus penutupan dan foto bersama.
- Adapun hasil dari kegiatan Rapat Konsinyering tersebut yakni :
 - Adanya rencana tindaklanjut dari 17 laporan penanganan laporan masyarakat;
 - Adanya 21 laporan Masyarakat yang ditutup saat Rapat Konsinyering;

- Adanya peningkatan kapasitas kemampuan Asisten Pemeriksa dalam penyelesaian dan penanganan laporan Masyarakat.
- f. Kesuksesan dalam Penanganan Laporan
- Dalam Triwulan Kedua Tim Pemeriksa aktif melaksanakan kegiatan penyelesaian laporan, penyelesaian laporan tersebut diharapkan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berikut terkait contoh-contoh kesuksesan penyelesaian laporan masyarakat yang dilakukan pada triwulan ke II:

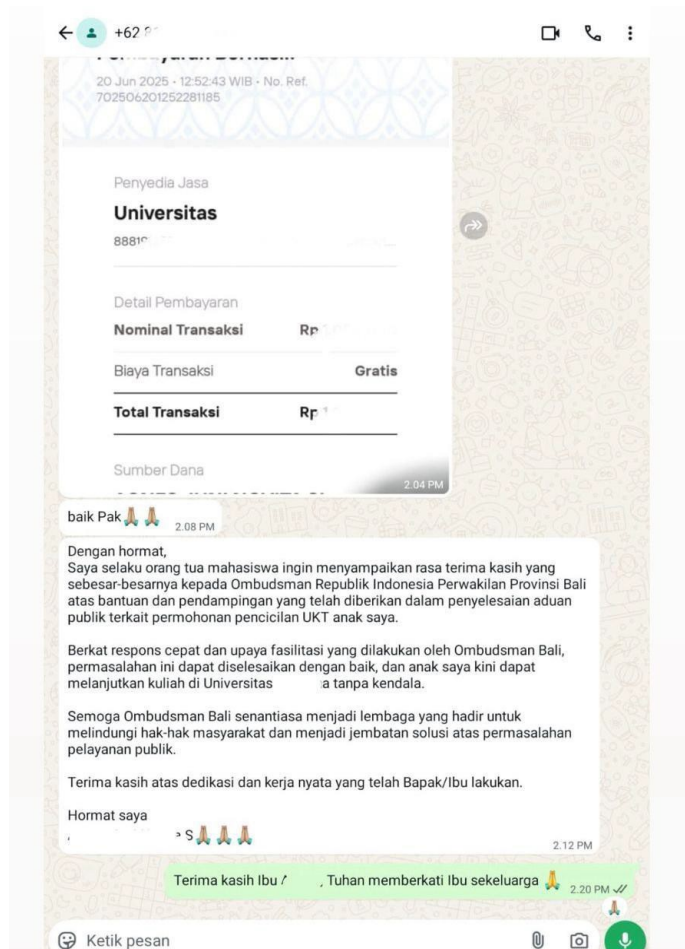
o Penyelesaian Laporan Pertanahan



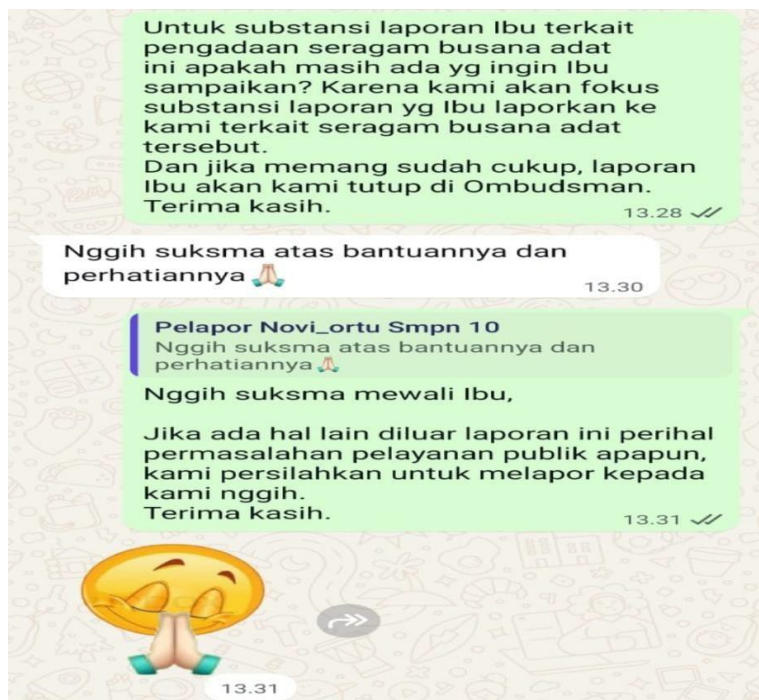
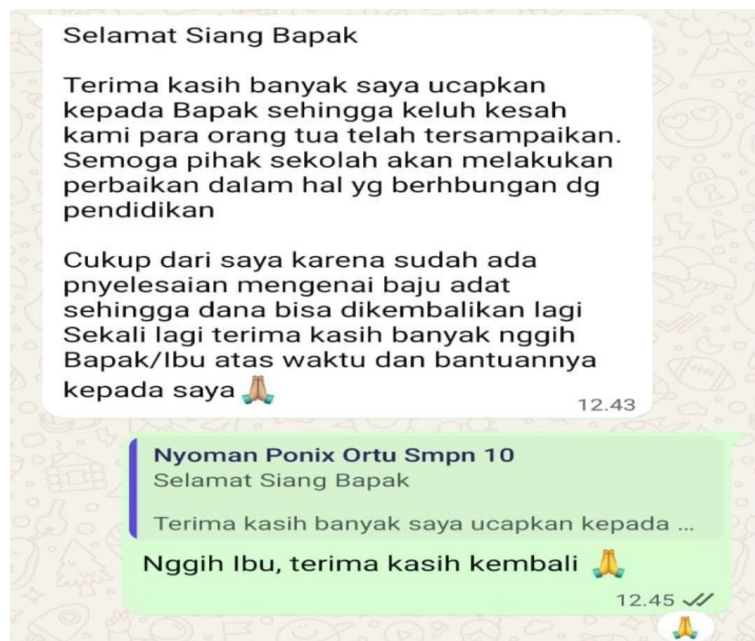
Pelapor merupakan masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah atas rumah Pelapor yang telah dilakukan pembelian terhadap rumah negara golongan III, namun pada saat prosesnya Pelapor diminta mendapatkan dokumen – dokumen di luar standar pelayanan yang Pelapor tidak dapat penuhi. Berdasarkan laporan Pelapor, Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi kepada Terlapor (Kantor Pertanahan) dimana segera ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan memanggil Pelapor untuk dijelaskan proses dan mekanismenya. Selanjutnya Pelapor menyampaikan kepada Tim Pemeriksa bahwa proses pensertifikatan telah dilanjutkan oleh Kantor Pertanahan.

- Penyelesaian Laporan Pembayaran UKT

Pelapor menyampaikan laporan bahwa Pelapor menginginkan agar pembayaran UKT anak pelapor bisa dicicil, Pelapor telah melakukan permohonan melalui email kepada pihak Universitas namun tidak ada tanggapan sampai dengan hari akhir pendaftaran ulang. Terkait hal tersebut Tim Pemeriksa melakukan penanganan laporan secara RCO (Reaksi Cepat Ombudsman) dengan melakukan klarifikasi kepada Terlapor, selanjutnya di hari yang sama Terlapor menghubungi pelpor dan menyetujui untuk pembayaran UKT bisa dilakukan dengan mencicil.



- Dalam Triwulan Ketiga Tim Pemeriksa aktif melaksanakan kegiatan penyelesaian laporan, penyelesaian laporan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berikut terkait contoh-contoh kesuksesan penyelesaian laporan masyarakat yang dilakukan pada triwulan ke III :



Ucapan terima kasih dari Pelapor dalam Penanganan Laporan Masyarakat terkait pengadaan seragam sekolah pada masa SPMB Tahun 2025.

SURAT UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Yth.
Ketua dan Seluruh Staf
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali
di Tempat

Dengan hormat,

Saya, Oktaviantari, dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali.

Berkat perhatian, pendampingan, serta kerja keras Bapak/Ibu sekalian, akhirnya proses balik nama tanah saya yang sempat terhambat di BPN dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini bukan hanya menyangkut penyelesaian administratif, tetapi juga menghadirkan kelegaan dan ketenangan batin bagi saya dan keluarga, setelah sekian lama berada dalam tekanan dan kebingungan menghadapi persoalan yang begitu berat.

Saya menyadari bahwa tanpa campur tangan Ombudsman RI Perwakilan Bali, perjuangan saya mungkin masih akan terhambat oleh birokrasi. Karena itu, saya sangat menghargai ketulusan, kesabaran, dan dedikasi Bapak/Ibu dalam membantu masyarakat kecil seperti saya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian layanan.

Semoga segala kebaikan dan pengabdian Bapak/Ibu mendapat balasan berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah.

Sekali lagi, terima kasih dari hati yang terdalam.

Hormat saya,



Oktaviantari

Ucapan terima kasih Pelapor dalam permasalahan agraria/pertanahan.

g. Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun	Capaian Tahun
Terlaksananya Penyelesaian laporan/ pengaduan Masyarakat yang efektif	Rata-rata lama Penyelesaian laporan/pengaduan	89 hari	48 hari
	Jumlah Lapoan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan (Nomor Register: 0252/IN/X/2025/DPS mengenai dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam Pelayanan Pengesahan Pajak Kendaraan Tahunan di mana terdapat perbedaan persyaratan antara pelayanan di Kantor Samsat dengan pelayanan inovasi lainnya
	Presentase laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan	85%	251 laporan dari 260 laporan (96,54%)
	Jumlah penyelesaian laporan reguler	246 Laporan secara keseluruhan.	251 laporan dari 246 laporan (102,03%)

Berdasarkan tabel diatas disampaikan bahwa capaian kinerja selama tahun 2025 sudah cukup baik di mana rata-rata penyelesaian laporan masih sesuai dengan baku mutu, selain itu telah dilakukan penutupan laporan backlog tahun lalu sehingga tidak ada lagi laporan backlog. Namun capaian yang perlu ditingkatkan lagi yaitu dalam hal jumlah penyelesaian dan presentase penyelesaian laporan. Peningkatan jumlah laporan sangat erat kaitannya dengan keinginan publik dalam menyampaikan pengaduan. Melihat daripada itu hal yang harus ditingkatkan yaitu kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mau menyampaikan pengaduannya kepada Ombudsman, selain itu publikasi terhadap keberhasilan-keberhasilan dalam penyelesaian pengaduan juga sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Ombudsman.

3.2.6 Program dan Kegiatan pada Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya kualitas pengawasan pelayanan publik			
1	Terlaksananya Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah instansi yang dinilai dengan hasil Opini Tertinggi	1 Provinsi, 8 Kab dan 1 Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. TW I – TW III kegiatan tidak dapat terlaksana karena ada blokir anggaran 2. TW IV dilaksanakan Pengambilan data di 5 Pemerintah daerah (Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Buleleng dan Kab. Karangasem)
2	Terlaksananya saran perbaikan kebijakan pelayanan publik	1 kajian	1 kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. TW I-III: Kajian sudah selesai tahap deteksi dan tahapan analisis 2. TW IV: 13 Oktober 2025, penyerahan LHP dilanjutkan Monitoring PPS pada minggu kedua bulan Desember
3	Terlaksananya kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Maladminsitrasi di Perwakilan	1 Kelompok	1 Kelompok	Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Peduli Maladminsitrasi di Perwakilan yang terdiri dari 3 Mahasiswa dan 5 perwakilan dari Organisasi Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
				Muhammadiyah Kota Denpasar dan Penambahan anggota 7 Mahasiswa di bulan September

Capain kinerja Keasistenan Pencegahan sudah cukup baik di mana dari 3 program kegiatan, 2 program kegiatan sudah terlaksana sesuai target. Dalam pemenuhan realisasi tersebut ada beberapa tantangan yakni dengan adanya dana yang diblokir sehingga pada kegiatan Opini tahun 2025 hanya terlaksana di lima Pemerintah Daerah.

1. Terkait pelaksanaan opini tahun 2025 dikarenakan buka anggaran sebesar 42% maka penilaian hanya dapat dilakukan di 5 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem,
2. Terkait Kajian Kebijakan Publik, telah dilaksanakan kegiatan Penyerahan hasil LHA pada tanggal 13 Oktober 2025 dan dilanjutkan dengan Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS) pada bulan Desember serta seluruh saran perbaikan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali,
3. Terkait Kelompok Masyarakat Peduli Maladminsitrasi di Perwakilan, sudah terbentuk 1 kelompok yang terdiri dari 3 Mahasiswa dan 5 perwakilan dari Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Denpasar dan ada penambahan anggota KMPDP dari unsur Mahasiswa di bulan September sebanyak 7 mahasiswa. Untuk kelompok yang sudah terbentuk pada tiap bulannya telah dilibatkan pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali seperti pelibatan kelompok dalam kegiatan peluncuran buku dan bincang bersama terkait pelayanan publik, pengambilan data kajian, pembuatan konten di media sosial serta pelibatan pendampingan pelayanan publik di Singaraja.

Selain target kinerja yang telah ditetapkan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun dengan lembaga vertikal. Hal ini ditandai

dengan permintaan undangan kegiatan dari lembaga lain serta permohonan narasumber.

Selama tahun 2025, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali juga banyak menghadiri undangan dari berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun dengan Lembaga Vertikal. Berikut adalah kegiatan kerja sama perwakilan yang dilaksanakan selama tahun 2025:

Tanggal	MoU/PKS/RK	Pemda/Universitas
17 Maret 2025	PKS Perwakilan	RRI Provinsi Bali
10 Juni 2025	PKS Perwakilan	Bawaslu Provinsi

Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali tahun 2025

Berikut kegiatan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Bulan Januari – Desember 2025,

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
03 Januari 2025	Undangan Serah Terima Jabatan dan Pengantar Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali	Kepala Perwakilan
07 Januari 2025	Audiensi dari PLN UID Bali	Kepala Perwakilan
08 Januari 2025	Koordinasi Konsep Tema Kajian Perwakilan Bali	Febri
09 Januari 2025	Undangan Penganugerahan Penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024	Kepala Perwakilan
09 Januari 2025	Undangan RDP Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Utusan Provinsi Bali Terkait Permohonan Informasi dan Klarifikasi Perihal Penyelenggaraan Study Tour dan Besaran Biaya Study Tour yang Dibebankan Kepada Siswa/i	Dewa, Yudi, Dinar
10 Januari 2025	Rapat Kerja Daerah Tahun 2025	Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
13 Januari 2025	Penyampaian Laporan Tahunan 2024	Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali
14 Januari 2025	Undangan Seminar “Penguatan Konsumsi dan Akselerasi Investasi Berkualitas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”	Agus
15 Januari 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Dhuha & Arlita
16 Januari 2025	Permintaan Klarifikasi Langsung Kepada Pihak Terkait	Kepala Perwakilan, Arlita, Dhuha
17 Januari 2025	Undangan Pakta Integritas Dalam Rangka Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A. 2025	Bagus
20 Januari 2025	Audiensi dengan Kepala LPP RRI Denpasar	Kepala Perwakilan, Pencegahan, Bayu
21 Januari 2025	Koordinasi Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik	Kepala Perwakilan, Dewa, Ima, Bagus, Agus
21 Januari 2025	Audiensi dengan Kepala Stasiun TVRI Bali	Kepala Perwakilan, Pencegahan, Bayu
22 Januari 2025	Undangan Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kandidat PNS Berprestasi di Lingkungan Kabupaten Badung	Dewa
22 Januari 2025	Undangan Acara Sambut Kenal Kepala Kanwil Ditjen Pas Bali	Kepala Perwakilan
22 Januari 2025	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Klarifikasi	Dhuha & Arlita
23 Januari 2025	Coffee Morning dan Diskusi dengan tema “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali	Kepala Perwakilan & Pencegahan
23 Januari 2025	Undangan Bedan Buku "Giant Pack of Lies, Kebohongan Besar Industri Rokok" & Diskusi Publik dengan tema “Refleksi 14 Tahun Perda KTR Bali”	Dhuha & Yudi

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
30 Januari 2025	Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a dan Eselon II.b serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Kepala Perwakilan
05 Februari 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Kepala Perwakilan, Arlita, Dewa, Yudi
06 Februari 2025	Undangan Diskusi Rapid Assesment Mengenai Pengawasan Layanan Pemeriksaan Kedatangan Warga Negara Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta	Kepala Perwakilan
10 Februari 2025	Undangan Fasilitasi Pelapor dengan Terlapor	Ima & Bagus
14 Februari 2025	Undangan Narasumber Kegiatan Komunikasi Penuh Inspirasi Persatuan Wartawan Tabanan dengan Tema "Diilema Honorer: Menanti Kepastian di Tengah Reformasi Birokrasi"	Kepala Perwakilan
17 Februari 2025	Audiensi dari KPKNL Singaraja	Kepala Perwakilan
24 Februari 2025	Undangan Penandatanganan Arrangement antara Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman Selandia Baru	Kepala Perwakilan
24 Februari 2025	Audiensi dari Kanwil Ditjenpas Bali	Kepala Perwakilan, Pencegahan, PVL, dan PL
25 Februari 2025	Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Secara Langsung	Bagus, Eva, Dewi
25 Februari 2025	Undangan Rapat Penjelasan Efisiensi Belanja	Kepala Perwakilan
26 Februari 2025	Undangan Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kandidat PNS Berprestasi di Lingkungan Kabupaten Badung	Dewa
26 Februari 2025	Undangan Webinar "Ombudsman and Access to Information: Iran's Perspective and Experience in Promoting the Transparency"	Kepala Perwakilan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
27 Februari 2025	Undangan Apel Peringatan Ulang Tahun Ke - 237 Kota Denpasar	Kepala Perwakilan
04 Maret 2025	Undangan Rapat Paripurna Ke - 9 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025	Kepala Perwakilan
06 Maret 2025	Audiensi ke BPJS Kesehatan Kedeputusan Wilayah Bali, NTB, NTT	Kepala Perwakilan, Pencegahan, PL
7, 11, 12, 13 Maret 2025	Undangan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengawasan Dalam Rikmin Awal Penerimaan Calon Anggota Polri T.A. 2025.	Eva
07 Maret 2025	Undangan Penandatanganan Pakta Integritas	Bagus
08 Maret 2025	Narasumber Kegiatan Kuliah Umum dengan Topik "Tantangan dan Peluang Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi"	Kepala Perwakilan
8 - 15 Maret 2025	Pengawasan Penerimaan Terpadu calon anggota Polri T.A. 2025 (Taruna/I Akpol, Bintara dan Tamtama)	Bagus
10 Maret 2025	Buka Puasa Bersama	Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali
11 Maret 2025	Narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) gabungan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertema "Sinergi Layanan Publik, Pengaduan & PPID Terpadu : Cepat, Tepat, Akurat dan Terbuka"	Kepala Perwakilan
11 Maret 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	Dhuha
12 Maret 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Dewa & Yudi
12 Maret 2025	Audiensi dari KPKNL Denpasar	Kepala Perwakilan & Kepala Keasistenan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
13 Maret 2025	Narasumber Kegiatan Penguatan Budaya Kerja dan Perubahan Pola Pikir Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Perwakilan
15 Maret 2025	Undangan Gelar Agung Pacalang Bali Tahun 2025	Febri
17 Maret 2025	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dengan LPP RRI Denpasar	Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali
17 Maret 2025	RDP DPD RI Uusan Provinsi Bali Terkait Pengawasan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Perihal Dugaan Diskriminasi Pada Pelayanan Administrasi Pernyataan Mandiri (Self Declare) Koperasi di Kota Denpasar	Dewa
18 Maret 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Dani, Arlita
18 Maret 2025	Permintaan Klarifikasi Langsung Kepada Pihak Terkait	Bagus
19 Maret 2025	Narasumber FGD Evaluasi Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dan Persiapan Penilaian Tahun 2025 di Lingkungan Polda Bali	Agus
19 Maret 2025	Undangan Finalisasi Kesepakatan Adat Antara Banjar Adata Pelasa dan Desa Adat Kuta	Dewa
22 Maret 2025	Undangan detikBali Awards 2025	Kepala Perwakilan
24 Maret 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik DPMPTSP Kota Denpasar	Pencegahan
09 April 2025	Undangan Rapat Penilaian Mangupura Award 2025 dan Penyusunan Petunjuk Teknis Mangupura Award 2025	Pencegahan
10 April 2025	Undangan Rapat Pimpinan Nasional	Kepala Perwakilan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
14 April 2025	Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang SMA dan SMK Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2025/2026	Dewa
14 April 2025	Undangan Kegiatan Dharma Shanti Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1947 dan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali	Kepala Perwakilan
14 April 2025	Penerimaan Mahasiswa PKL STAHN Mpu Kuturan Singaraja	Kepala Perwakilan & Pencegahan
15 April 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik Disdikpora Kota Denpasar	Agus
15 April 2025	Undangan Pembahasan Juknis ASN Berprestasi Tahun 2025	Dhuha
15 April 2025	Audiensi dari Bawaslu Provinsi Bali	PL, PVL, Pencegahan, Bayu
16 April 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus & Agus
17 April 2025	Klarifikasi Langsung Kepada Pihak Terkait	Dhuha
17 April 2025	Undangan Pengukuhan Kepala BPS Provinsi Bali	Kepala Perwakilan
25 April 2025	Undangan Verifikasi dan Seleksi Administrasi Kandidat PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	Dewa
25 April 2025	Sosialisasi Program dan Pengukuhan Kelompok Peduli Masyarakat di Perwakilan	Pencegahan
28 April 2025	Narasumber Kegiatan Pendampingan Persiapan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Bangli Tahun 2025	Kepala Perwakilan & Agus
28 April 2025	Undangan Tasyakuran Hari Bakti Pemasarakatan Ke-61 Tahun 2025	Dewa
29 April 2025	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Pendidikan	Kepala Perwakilan & Kepala Keasistenan
30 April 2025	Undangan Kick-Off BALIGIVATION 2025	Kepala Perwakilan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
04 Mei 2025	Pelaksanaan Pemantauan Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Tahap II di Pemerintah Kabupaten Buleleng	Kepala Perwakilan & Dinar
07 Mei 2025	Undangan Pembahasan Penilaian Tahap III Pemberian Penghargaan Adhyasta Prajaniti bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025	Dani
07 Mei 2025	Rapat Pimpinan Nasional	Kepala Perwakilan & Kepala Keasistenan
08 Mei 2025	Undangan Pencanaan Zona Integritas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII	Kepala Perwakilan
08 Mei 2025	Undangan Rapat Persiapan Monev Pelayanan Publik dan Tatalaksana Tahun 2025	Bagus
08 Mei 2025	Undangan Verifikasi Lapangan Kandidat PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	Dewa
10 Mei 2025	Pemantauan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK T.A 2024 Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar	Dewa
13 Mei 2025	Undangan Peninjauan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pada Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Badung Formasi Tahun 2024 Tahap II	Kepala Perwakilan
14 Mei 2025	Seleksi Kompetensi Tahap II PPPK Tahun anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	Bagus
14 Mei 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik terkait Pelayanan Publik di lingkungan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Febri
15 Mei 2025	Undangan Pertemuan Para Pihak	Dewa & Ima
16 Mei 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 terkait Pelayanan Publik pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung	Dhuha

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
20 Mei 2025	Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Secara Langsung	Bagus, Ima, Yudi
20 Mei 2025	Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Mangupura Award 2025	Pencegahan
22 Mei 2025	Undangan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan pelaksanaan Bale Paruman Adyaksa	Agus & Febri
22 Mei 2025	Pembukaan Posko Pengaduan SPMB	Kepala Perwakilan & PL
26 Mei 2025	Klarifikasi Langsung Kepada Pihak Terkait	Dewa, Dani, Yudi
26 Mei 2025	Pertemuan Para Pihak	Dhuha
28 Mei 2025	Undangan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2025/2026	Kepala Perwakilan
30 Mei 2025	Narasumber Acara Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tingginya Angka Kematian Siswa Bunuh Diri serta Implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023	Kepala Perwakilan
01 Juni 2025	Undangan Pembukaan Bulan Bung Karno VII Tahun 2025	Dewa
02 Juni 2025	Undangan Pembukaan Bali Jagadhita VI Tahun 2025	Kepala Perwakilan
03 Juni 2025	Undangan Verifikasi Administrasi Kandidat PNS Berprestasi di Lingkungan Kabupaten Badung	Dewa
03 Juni 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik	Bagus
4 - 5 Juni 2025	Undangan Pembahasan Penilaian Tahap III Pemberian Penghargaan Adhyasta Prajaniti bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025	Dani
05 Juni 2025	Undangan Rapat Paripurna Ke - 16 DPRD Provinsi Bali	Kepala Perwakilan
10 Juni 2025	Monitoring dan Evaluasi Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Pendidikan Ganesha	Bagus

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
10 Juni 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
11 Juni 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
12 Juni 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
11 - 12 Juni 2025	Undangan Verifikasi Lapangan Kandidat PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	Dewa
13 Juni 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
15 Juni 2025	Undangan Bali QRIS Summer Run 2025	Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali
16 Juni 2025	Dialog Interaktif "Mengawal Proses SPMB 2025"	Kepala Perwakilan & Dewa
17 Juni 2025	Audiensi Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Kepala Perwakilan, Bagus, Ima
17 Juni 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Dewa & Yudi
17 Juni 2025	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kapal Cruise	Agus & Febri
18 - 20 Juni 2025	Undangan Paparan Inovasi dan Wawancara Kandidat PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	Dewa
18 Juni 2025	Undangan Workshop Kurikulum Prodi S1 Hukum dan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar	Febri
18 Juni 2025	Wawancara Pengawasan Kearsipan Internal	Darmawan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
19 Juni 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Kepala Perwakilan, Bagus, Ima, Dinar
19 Juni 2025	Narasumber Sosialisasi Pengaduan SP4N-LAPOR!, KONTAK BUPATI dan Whistleblowing System	Dani
21 Juni 2025	Undangan Pelepasan Peed Aya (Pawai) Pesta Kesenian Bali XLVII Tahun 2025	Kepala Perwakilan
22 Juni 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali”	Kepala Perwakilan, Agus, Febri
29 Juni 2025	Undangan Penutupan Bulan Bung Karno VII Tahun 2025	Agus
30 Juni 2025	Narasumber Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Balai Besar Veteriner Denpasar	Kepala Perwakilan
30 Juni 2025	Undangan Implementasi Komitmen Bersama Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali	Dewa
30 Juni 2025	Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	Dhuha & Yudi
30 Juni 2025	Undangan Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali	Dani
30 Juni 2025	Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	Ima & Dinar
30 Juni 2025	Koordinasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar	Kepala Perwakilan & Dewa
Selasa, 1 Juli 2025	Undangan Upacara Hari Bhayangkara Ke-79	Kepala Perwakilan
Selasa, 1 Juli 2025	Audiensi dari Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasaryakatan	Kepala Perwakilan & Kepala Keasistenan
30 Juni, 1 Juli & 3 Juli 2024	Pendampingan dan Pengawasan SPMB Tahun 2025	Bagus

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Rabu, 2 Juli 2025	Undangan Permintaan penjelasan/klarifikasi terkait pengaduan WBS an. I Kadek Agus Mulyawan	Kepala Perwakilan, Dewa, Ima
Kamis, 3 Juli 2025	Narasumber Bimbingan Teknis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kesima Petilan	Febri
Jumat, 4 Juli 2025	Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	Febri & Bagus
Jumat, 4 Juli 2025	Undangan Webinar Sosialisasi Percepatan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber serta Gerakan Bali Bersih Sampah	Dika & Darmawan
Senin, 7 Juli 2025	Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	Agus & Bagus
Senin, 7 Juli 2025	Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	Ima & Dani
Selasa, 8 Juli 2025	Undangan Sarasehan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma	Bagus
Selasa, 8 Juli 2025	Pertemuan Para Pihak	Dhuha
Selasa, 8 Juli 2025	Undangan Rapat Revisi Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Bayu
Rabu, 9 Juli 2025	Narasumber Kegiatan Sosialisasi dengan Tema "Pengawasan Pelayanan Publik : Pencegahan Maladministrasi Menuju Pelayanan Publik Berkualitas"	Kepala Perwakilan & Agus
Rabu, 9 Juli 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Ima & Bagus
Jumat, 11 Juli 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Bagus
Senin, 14 Juli 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Ima, Yudi, Dinar

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Senin, 14 Juli 2025	Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	Arlita & Eva
Senin, 14 Juli 2025	Undangan Monev Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Bagus
Selasa, 15 Juli 2025	Undangan Rapat Pembinaan Kearsipan Pencegahan Maladministrasi	Pencegahan & Darmawan
Kamis, 17 Juli 2025	Undangan Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali	Bagus
Kamis, 17 Juli 2025	Undangan Diskusi Pembobotan pada Variabel Pembentukan Kepercayaan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Agus
Jumat, 18 Juli 2025	Narasumber Sosialisasi UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Program Join Account serta Kantin Sehat Sekolah	Dhuha
Selasa, 22 Juli 2025	Undangan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PWI Provinsi Bali Periode 2025 - 2030	Kepala Perwakilan
Rabu, 23 Juli 2025	Field Evaluation Dalam Rangka Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (ZI WBBM) Tahun 2025 pada KPKNL Denpasar	Kepala Perwakilan & Agus
Rabu, 23 Juli 2025	Koordinasi Pasca Pelaksanaan SPMB Tahun 2025/2026	Pemeriksaan
22 & 23 Juli 2025	Undangan Penilaian Presentasi dan Wawancara ASN Berprestasi Tahun 2025	Dhuha
Kamis, 24 Juli 2025	Survey Pelayanan Publik Pengadilan Agama Denpasar Tahun 2025	Pencegahan
Kamis, 24 Juli 2025	Undangan Evaluasi Hasil Penilaian PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	Dewa

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Kamis, 24 Juli 2025	Undangan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh DPD RI Provinsi Bali	Bagus & Ima
Senin, 28 Juli 2025	Undangan Penutupan Festival Seni Bali Jani VII 2025	Kepala Perwakilan
Selasa, 29 Juli 2025	Undangan Narasumber Kegiatan ISO 2025 IPB Internasional	Sesi 1: Dhuha & Yudi Sesi 2: Dani & Arlita
Selasa, 29 Juli 2025	Undangan Menghadiri Kunjungan Kerja Oleh Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Utusan Provinsi Bali	Dewa
Selasa, 29 Juli 2025	Penyerahan Hasil Survey Penilaian Standar Pelayanan Publik Pengadilan Agama Denpasar	Kepala Perwakilan & Pencegahan
Rabu, 30 Juli 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
Rabu, 30 Juli 2025	Focus Group Discussion Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Khususnya Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025	Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali
Rabu, 30 Juli 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan KPPBC TMP A Denpasar	Ima & Dani
Rabu, 30 Juli 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
Kamis, 31 Juli 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
Kamis, 31 Juli 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Pencegahan
Jumat, 1 Agustus 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Bagus

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Selasa, 5 Agustus 2025	Undangan Launching Program PASTI “Perwalian Anak Sinergi Terpadu dan Inklusif”	Kepala Perwakilan
Selasa, 5 Agustus 2025	Pendampingan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan	Dhuha
Selasa, 5 Agustus 2025	Narasumber Kegiatan Rapat Kerja DPD RI Utusan Provinsi Bali Terkait Edukasi dan Penguatan Anti Pungli, Pencegahan Korupsi Sejak Dini, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, dan Penanaman Sikap Nasionalisme di Kalangan Pelajar	Dewa
Selasa, 5 Agustus 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Ima
Selasa, 5 Agustus 2025	Menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman RI dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan RI	Kepala Perwakilan
Rabu, 6 Agustus 2025	Narasumber Dalam Acara Rapat Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Utusan Provinsi Bali Bersama Kepala Sekolah, Ketua Yayasan dan Ketua Komite SD dan SMP	Dewa
6 - 7 Agustus 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali”	Pencegahan
Jumat, 8 Agustus 2025	Pelantikan Ikatan Wartawan Online Provinsi Bali, Pengurus Daerah Badung & Kota Denpasar Periode 2024 - 2029	Kepala Perwakilan
Senin, 11 Agustus 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali”	Pencegahan
Selasa, 12 Agustus 2025	Undangan Lomba Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Bawaslu Provinsi Bali	Kepala Perwakilan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Selasa, 12 Agustus 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali”	Pencegahan
Selasa, 12 Agustus 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Arlita
Rabu, 13 Agustus 2025	Permintaan Data dan Informasi Kajian “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali”	Pencegahan
Rabu, 13 Agustus 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Eva
Rabu, 13 Agustus 2025	Audiensi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Kepala Perwakilan
Kamis, 14 Agustus 2025	Undangan Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali Tahun 2025	Kepala Perwakilan
Kamis, 14 Agustus 2025	Undangan Rapat Paripurna Ke - 34 dan Ke - 35 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025	Kepala Perwakilan
Jumat, 15 Agustus 2025	Gowes KPU Bali Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan KPU Pasca Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Kepala Perwakilan, Agus, Febri, Arlita, Arief
Jumat, 15 Agustus 2025	Verifikasi lapangan Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Buleleng	Pencegahan
Jumat, 15 Agustus 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Dhuha
Minggu, 17 Agustus 2025	Undangan Upacara Bendera Peringatan Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia	Seluruh Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali
Minggu, 17 Agustus 2025	Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia	Kepala Perwakilan
Minggu, 17 Agustus 2025	Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia	Febri
Minggu, 17 Agustus 2025	Upacara Penurunan Bendera Merah Putih	Dewa

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Minggu, 17 Agustus 2025	Upacara Penurunan Bendera Merah Putih	Febri
Jumat, 22 Agustus 2025	Undangan Pengukuhan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar	Dani
Jumat, 22 Agustus 2025	Undangan Acara Alliance Renewal IPB Internasional	Bayu & Yudi
21 - 23 Agustus 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Dewa, Agus, Febri
20 - 23 Agustus 2025	Mengikuti Program Pelatihan Inclusive and Transformative Leadership yang dilaksanakan oleh DeakinCo)	Kepala Perwakilan
Sabtu, 23 Agustus 2025	Menghadiri Seleksi Wawancara JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar	Kepala Perwakilan
Senin, 25 Agustus 2025	Undangan Sebagai Peserta dan Narasumber Dalam Kegiatan FGD Polresta Denpasar tahun 2025	Agus & Arlita
Selasa, 26 Agustus 2025	Audiensi dari LBH Tombak Keadilan	Kepala Perwakilan
19 - 21 & 25 - 27 Agustus 2025	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Publik 2025 Pemerintah Kabupaten Tabanan	Dhuha
Selasa, 26 Agustus 2025	Permintaan Keterangan Pihak Terkait	Eva
Rabu, 27 Agustus 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus, Ima, Arlita
Rabu, 27 Agustus 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik Perijinan Lisensi Arsitek Provinsi Bali di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Agus
Kamis, 28 Agustus 2025	Undangan Focus Group Discussion Sinergi Lembaga Layanan untuk Menajamkan Solusi	Dewa

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
	Penanganan Konflik Pengasuhan yang Berperspektif Hak Anak	
28 - 29 Agustus 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Dewa, Bagus, Yudi
1, 2, 4 September 2025	Undangan Penilaian Presentasi Mangupura Award 2025	Febri
1 - 3 September 2025	Undangan Penilaian Presentasi Mangupura Award 2025	Dhuha
1 - 4 September 2025	Pelatihan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas	Arlita
Senin, 1 September 2025	Undangan Pelantikan Serta Pengambilan Sumpah JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar	Kepala Perwakilan
Senin, 1 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus, Ima, Dinar
Senin, 1 September 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	Agus
Selasa, 2 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus, Ima, Agus, Dinar
Rabu, 3 September 2025	Undangan Penilaian Presentasi Mangupura Award 2025	Agus
Rabu, 3 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Kepala Perwakilan, Dewa, Febri
2 - 3 September 2025	Undangan Kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan	Yudi

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Kamis, 4 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat Pengamanan dan Pengendalian Massa Aksi Unjuk Rasa	Dewa, Dinar, Yudi
8 - 9 September 2025	Undangan Kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan	Dhuha
8, 9, 11 September 2025	Undangan Penilaian Presentasi Mangupura Award 2025	Agus & Febri
Senin, 8 September 2025	Audiensi dari BPK Provinsi Bali	Kepala Perwakilan & Kepala Keasistenan
Selasa, 9 September 2025	Permintaan Data dan Informasi Perihal Pengamanan dan Pengendalian Massa Aksi Unjuk Rasa oleh Polda Bali	PL
Selasa, 9 September 2025	Penguohan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Pencegahan
Kamis, 11 September 2025	Undangan Diskusi Kajian Singkat Mengenai Pengawasan Layanan Pemeriksaan Kedatangan Warga Negara Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kepala Perwakilan & Pencegahan
Jumat, 12 September 2025	Undangan HUT Ke - 66 PEPABRI Tahun 2025	Dewa
Jumat, 12 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus, Ima, Agus, Dinar
Jumat, 12 September 2025	Audiensi dari FISIP Universitas Warmadewa	Kepala Perwakilan & Pencegahan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Senin, 15 September 2025	Undangan Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI	Dani & Ima
15 - 17 September 2025	Undangan Penilaian Presentasi Mangupura Award 2025	Agus
15 - 17 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Kepala Perwakilan, Dewa, Yudi
Rabu, 17 September 2025	Undangan Menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI	Kepala Perwakilan
17 - 19 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus, Ima, Agus, Dinar
18 - 19 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Kepala Perwakilan, Dhuha, Eva
Jumat, 19 September 2025	Permohonan Data dan Informasi Kajian terkait "Layanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandar Udara"	Kepala Perwakilan, Dhuha, Eva
Jumat, 19 September 2025	Permohonan Data dan Informasi Kajian terkait "Layanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandar Udara"	Kepala Perwakilan, Dhuha, Eva
Jumat, 19 September 2025	Permohonan Data dan Informasi Kajian terkait "Layanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandar Udara"	Kepala Perwakilan, Dhuha, Eva
22 - 24 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus, Ima, Dinar
Senin, 22 September 2025	Koordinasi Konsep Laporan Hasil Analisis Perwakilan	Febri

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
Senin, 22 September 2025	Undangan Menghadiri Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025	Kepala Perwakilan
Selasa, 23 September 2025	Undangan Menghadiri Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025	Kepala Perwakilan
Selasa, 23 September 2025	Undangan Sosialisasi PEKPPP Mandiri	Dhuha & Eva
Rabu, 24 September 2025	Undangan Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025	Dani
23 - 25 September 2025	Verifikasi Lapangan Mangupura Award 2025 Kategori Perangkat Daerah	Febri
23 - 25 September 2025	Verifikasi Lapangan Mangupura Award 2025 Kategori Pemerintah Desa	Agus
Kamis, 25 September 2025	Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Siswa Tahun 2025	Dewa
Kamis, 25 September 2025	Undangan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	Dani
Kamis, 25 September 2025	Audiensi dari Polda Bali	Dani & Dewa
Jumat, 26 September 2025	Undangan Peringatan Hari Statistik Nasional 2025	Dewa
Jumat, 26 September 2025	Undangan Gerakan Aksi Penanaman Pohon bersama Menteri Lingkungan Hidup	Dika, Yudi, Pageh, Arief, Abdi

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
23 - 26 September 2025	Verifikasi Lapangan Mangupura Award 2025 Kategori Kelurahan	Dhuha
Selasa, 30 September 2025	Audiensi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Kepala Perwakilan & Kepala Keasistenan
29 - 30 September 2025	Verifikasi Lapangan Mangupura Award 2025 Kategori Perangkat Daerah	Febri
Senin, 29 September 2025	Verifikasi Lapangan Mangupura Award 2025 Kategori Pemerintah Desa	Agus
Selasa, 30 September 2025	Verifikasi Lapangan Mangupura Award 2025 Kategori Pemerintah Desa	Ima
29 - 30 September 2025	Klarifikasi, Koordinasi, dan Permintaan Data Untuk Penyelesaian Laporan Masyarakat	Bagus & Dewa
30 September - 2 Oktober 2025	PVL On The Spot	Dani, Dhuha, Arlita, Eva
01 Oktober 2025	Undangan Stakeholder Gathering 2025 Bank BPR Kanti	Kepala Perwakilan
02 Oktober 2025	Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian PKP	Kepala Perwakilan
03 Oktober 2025	Undangan Rapat Pembahasan Hasil Monev Lapangan Rumah Bersubsidi di Provinsi Bali bersama Pihak Pengembang	Kepala Perwakilan & Dewa
03 Oktober 2025	Focus Group Discussion dan diskusi dengan tema "Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali"	Kepala Perwakilan & Pencegahan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
06 Oktober 2025	Kunjungan Pembimbing Magang Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Terkait Monitoring Mahasiswa Magang Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta	Kepala Perwakilan & Kepala Keasistenan Pencegahan
08 Oktober 2025	Pertemuan dengan DPD GERKATIN Provinsi Bali	Kepala Perwakilan, Dani, Bayu
13 Oktober 2025	Penyampaian Laporan Hasil Analisis Kajian “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisata Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali”	Kepala Perwakilan & Pencegahan
16 Oktober 2025	Undangan Pembahasan Evaluasi Pengelolaan Data SIMPeL4	Kepala Perwakilan
17 Oktober 2025	Pelatihan Jurnalistik dengan peserta Kelompok Peduli Masyarakat Di Perwakilan (KMPDP) di Ombudsman RI Perwakilan Bali	Kepala Perwakilan, Pencegahan, Dika, Ayu
20 - 23 Oktober 2025	Undangan Pra Rapat Kerja Nasional II Tahun 2025	Kepala Perwakilan
21 - 22 Oktober 2025	Koordinasi & Monitoring Pelayanan Publik	Kepala Perwakilan, Bayu, Ayu
23 - 24 Oktober 2025	Koordinasi & Monitoring Pelayanan Publik	Kepala Perwakilan, Dika, Darmawan
31 Oktober 2025	Narasumber Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Penegakan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Kepala Perwakilan
01 November 2025	Undangan Dekranasda Bali Fashion Week	Kepala Perwakilan
03 November 2025	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Mengenai “Pelayanan Pengesahan Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali”	Kepala Perwakilan & Asisten Pemeriksaan
3 - 5 November 2025	Penjaminan Mutu dan Supervisi Pengambilan Data	Kepala Perwakilan, Agus, Darmawan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
5 - 6 November 2025	Menghadiri Kegiatan Rapat Intensif dengan Tema "Menjaga Kesehatan Mental dan Fisik guna Mempertahankan Produktivitas dan Meningkatkan Kreativitas Kerja Keasistenan Utama Manajemen Mutu"	Kepala Perwakilan, Febri, Dewa
07 November 2025	Narasumber Kegiatan Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Kepala Perwakilan
09 November 2025	Undangan Anugerah Penyiaran Bali 2025	Kepala Perwakilan
10 - 14 November 2025	Rapat Kerja Nasional II Ombudsman RI Tahun 2025	Kepala Perwakilan
17 - 21 November 2025	Kegiatan Pelatihan English For Effective Presentations Skills For Leadership	Kepala Perwakilan
17 November 2025	Penjaminan Mutu dan Supervisi Pengambilan Data	Kepala Perwakilan, Agus, Bayu
21 November 2025	Undangan Acara Tasyakuran peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Ke-1 Tahun 2025	Kepala Perwakilan
24 - 25 November 2025	Undangan Rapat Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan dengan tema "Penguatan Peran Imigrasi dalam Mendukung Pariwisata dan Investasi Berkelanjutan di Provinsi Bali"	Kepala Perwakilan
27 November 2025	Undangan Menghadiri Kunjungan Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Kuntabilitas Publik DPD RI Utusan Provinsi Bali Terkait Aspirasi Masyarakat Tentang Evaluasi Tata Kelola dan Aksesibilitas Transportasi Pariwisata di Kawasan Pelabuhan Sanur Berbasis Standar Internasional Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	Kepala Perwakilan
27 November 2025	Narasumber Kegiatan Workshop Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kabangkitan Nasional	Kepala Perwakilan

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
01 Desember 2025	Monitoring Tindakan Korektif Investigasi Inisiatif Terhadap Permasalahan Pelayanan Publik	Kepala Perwakilan, Bagus, Ima
02 Desember 2025	DEKRANASDA Bali Fashion Week 2025 Session 2	Kepala Perwakilan
2 - 3 Desember 2025	Monitoring Tindakan Korektif Investigasi Inisiatif Terhadap Permasalahan Pelayanan Publik	Kepala Perwakilan, Bagus, Ima
04 Desember 2025	Narasumber Lokakarya Pemahaman Hak dan Kewajiban Tuli Sebagai Warganegara dan Penandatanganan PKS: Ombudsman RI Perwakilan Bali dan DPD GERKATIN Provinsi Bali	Kepala Perwakilan
4 - 5 Desember 2025	Monitoring Tindakan Korektif Investigasi Inisiatif Terhadap Permasalahan Pelayanan Publik	Kepala Perwakilan, Dewa, Ima
08 Desember 2025	Undangan Penutupan DEKRANASDA Bali Fashion Week 2025 Sesi 2	Kepala Perwakilan
8 - 12 Desember 2025	Perlakuan Pelaksanaan Saran di Kabupaten Badung	Kepala Perwakilan, Agus, Febri, Dhuha, Yudi
14 Desember 2025	Undangan Pembukaan MUSDA XII MUI Provinsi Bali Tahun 2025	Kepala Perwakilan
19 Desember 2025	Undangan Penganjangan Zona Integritas	Kepala perwakilan
20 Desember 2025	Undangan Pembukaan Denpasar Festival 18 Tahun 2025	Kepala Perwakilan
24 Desember 2025	Undangan Persembahyangan Bersama Sekaligus Matur Piuning dan Memohon Restu Pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125	Kepala Perwakilan (Batal Hadir)
29 Desember 2025	Pengawasan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Tahun 2025	Kepala Perwakilan

3.3. PEMBERITAAN KABAR PERWAKILAN DAN REALISASI ANGGARAN

3.3.1. Pemberitaan kabar Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali di media online lokal dan konten di media sosial perwakilan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pemberitaan Kabar Perwakilan dan Sosial Media Tahun 2025 :

NO	LINK BERITA	TANGGAL PUBLISH
1	https://www.nusabali.com/berita/184367/ombudsman-bali-kawal-tata-kelola-makan-bergizi-gratis-pastikan-kesesuaian-menu	13-Jan
2	https://www.nusabali.com/berita/184368/semakin-banyak-masyarakat-bali-mengawasi-pelayanan-publik-di-2024	13-Jan
3	https://www.nusabali.com/berita/184400/ombudsman-ri-bali-selama-2024-terima-468-konsultasi-masyarakat	14-Jan
4	https://www.rri.co.id/daerah/1267015/kolaborasi-ombudsman-bali-dengan-rri-meningkatkan-pelayanan-publik	20-Jan
5	https://www.detik.com/bali/berita/d-7746843/ombudsman-bali-soroti-pungutan-turis-asing-yang-belum-maksimal	23-Jan
6	https://www.mcwnews.com/read/ombudsman-bali-ikut-pelototi-program-makan-bergizi-gratis?page=all	23-Jan
7	https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7747123/pungutan-turis-asing-rp-318-miliar-dialokasikan-untuk-bkk-hingga-desa-adat	23-Jan
8	https://www.ringtimes.id/berita/74901993/ombudsman-bali-soroti-pengawasan-program-makan-bergizi-gratis-pemda-diminta-proaktif	23-Jan
9	https://rri.co.id/denpasar/daerah/1276547/realisasi-pwa-lampau-target-ini-kata-sekda-dewa-indra	24-Jan
10	https://atnews.id/portal/news/24163/	24-Jan
11	https://balipolitika.com/2025/01/24/bali-dapat-dana-segar-dari-wisman-rp318-miliar-lewat-pwa/	24-Jan
12	https://www.antaraneews.com/berita/4607686/sekda-bali-pastikan-penggunaan-dana-pungutan-wisman-sesuai-aturan	25-Jan
13	https://barometerbali.com/2025/01/26/ombudsman-bali-soroti-pengawasan-program-makan-bergizi-gratis-pemda-diminta-proaktif/	26-Jan

NO	LINK BERITA	TANGGAL PUBLISH
14	https://travel.detik.com/travel-news/d-7751269/ombudsman-soroti-dugaan-maladministrasi-pariwisata-pungutan-turis-asing-di-bali	27-Jan
15	https://kabarnusa.com/langkah-pasti-kemenkumham-dan-ombudsman-bali-tingkatkan-kualitas-pelayanan-hukum/	25-Feb
16	https://www.beritasatu.com/network/kabarnusa/466900/langkah-pasti-kemenkumham-dan-ombudsman-bali-tingkatkan-kualitas-pelayanan-hukum	25-Feb
17	https://www.nusabali.com/berita/187430/kemenkum-bali-dan-ombudsman-perkuat-sinergi-untuk-pelayanan-hukum-yang-lebih-baik	25-Feb
18	https://www.nusabali.com/berita/187482/kemenkum-dan-ombudsman-bali-sepakat-perkuat-sinergitas	26-Feb
19	https://www.rri.co.id/bali/hukum/1359942/kemenkum-bali-dan-ombudsman-ri-perkuat-sinergitas-pelayanan-hukum	01-Mar
20	https://www.balisharing.com/2025/04/15/bawaslu-bali-jajaki-kolaborasi-strategis-dengan-ombudsman-ri-perwakilan-bali/	15-Apr
21	https://www.nusabali.com/berita/191580/ombudsman-asistensi-kepatuhan-pelayanan-publik-di-pemkab-bangli	29-Apr
22	https://balipolitika.com/2025/04/28/ombudsman-ri-beri-penghargaan-kepada-pemkab-bangli/	28-Apr
23	https://baliportalnews.com/2025/04/ombudsman-ri-lakukan-asistensi-dan-serahkan-penghargaan-untuk-6-perangkat-daerah-di-bangli/	28-Apr
24	https://www.detik.com/bali/berita/d-7890321/6-opd-pemkab-bangli-dapat-penghargaan-dari-ombudsman	28-Apr
25	https://baliberkarya.com/berita/202208159010/bangli-siap-tingkatkan-standar-pelayanan-publik-asisten-iii-buka-asistensi-ombudsman-ri-bali	28-Apr
26	https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/ombudsman-bali-akui-pernah-ada-laporan-soal-graduation-siswa?page=all	10-May
27	https://pancarpos.com/16/05/2025/fkp-2025-samsat-badung-jadi-role-model-nasional-layanan-drive-thru-2-menit-selesai-diapresiasi-ombudsman-bali/	16-May

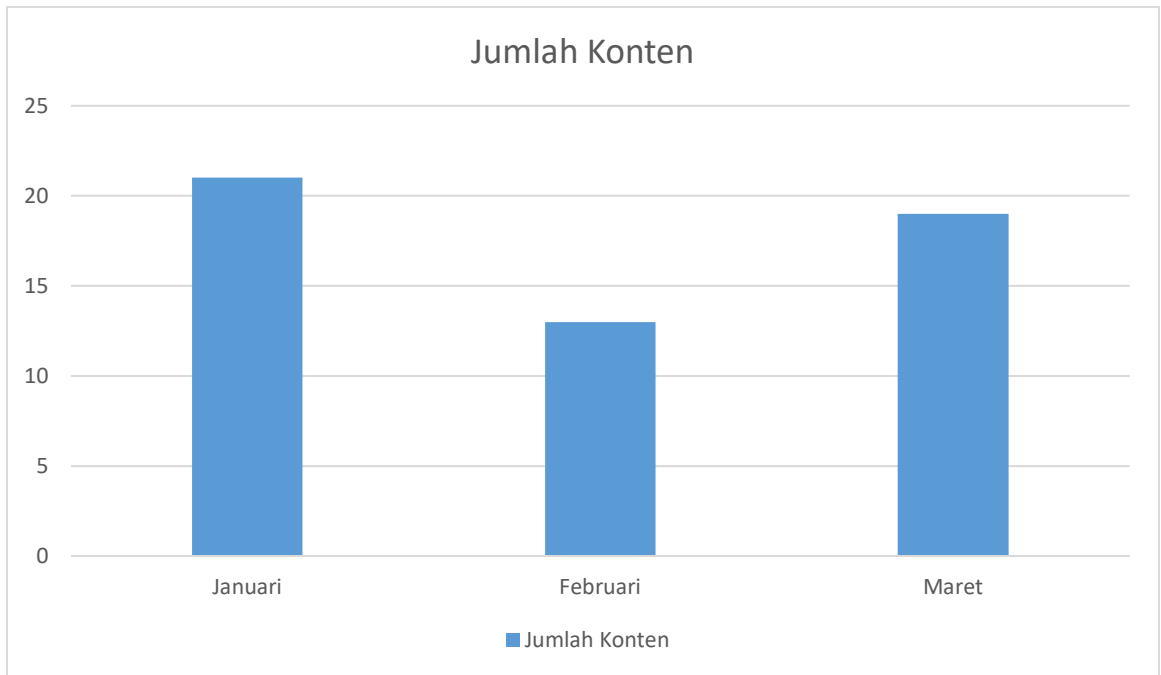
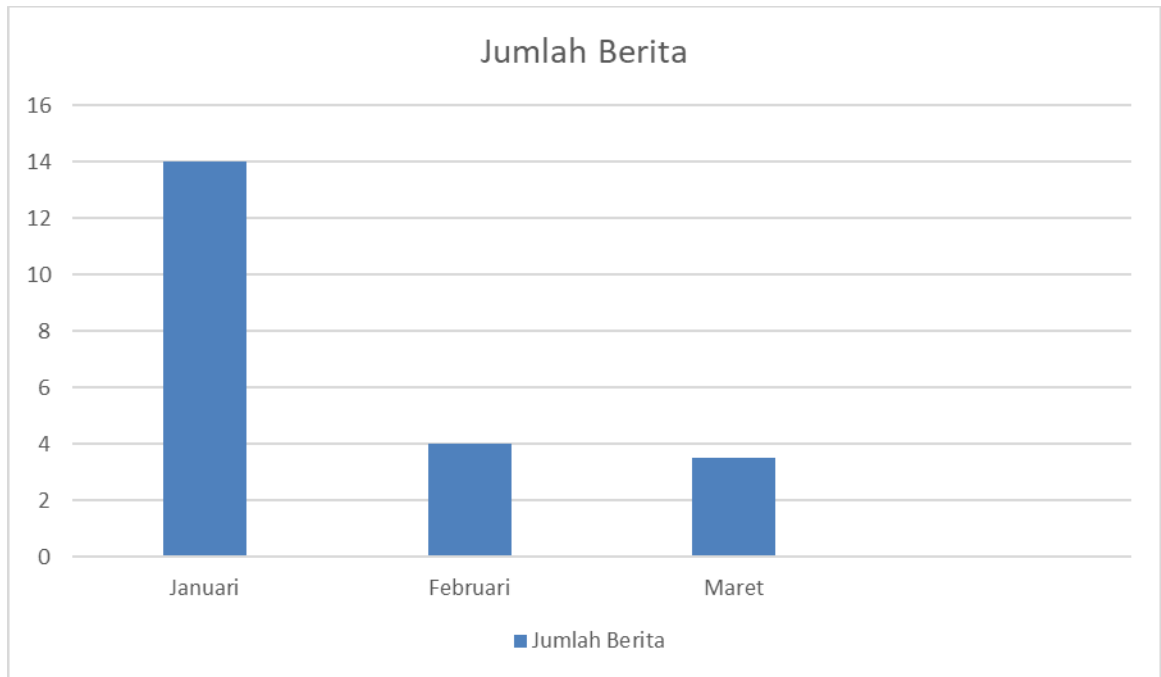
NO	LINK BERITA	TANGGAL PUBLISH
28	https://www.detik.com/bali/berita/d-7926662/ombudsman-soroti-siswa-titipan-jelang-spmb-2025-di-bali	22-May
29	https://www.nusabali.com/berita/193142/sebut-bali-bisa-sekolah-gratis-bmps-minta-ombudsman-awasi-apbd-pendidikan	22-May
30	https://radarbalijawapos.com/bali/706048306/ppdb-gaya-baru-cegah-jalur-tidak-resmi-ombudsman-minta-disdikpora-buat-pedoman-penanganan-siswa-tercecer	22-May
31	https://barometerbali.com/komisi-v-dprd-bali-dorong-pembenahan-sistem-kurasi-jelang-penerimaan-siswa-baru/	22-May
32	https://www.nusabali.com/berita/193141/ombudsman-panggil-disdikpora-se-bali-terkait-spmb-2025-minta-transparansi-penanganan-siswa-tercecer	22-May
33	https://atnews.id/portal/news/25291/	23-May
34	https://independensi.com/2025/05/23/bmps-bali-dorong-pemberdayaan-sekolah-swasta-dalam-pelaksanaan-spmb-2025-2026/	23-May
35	https://www.balipost.com/news/2025/05/25/460074/SPMB-2025,Ombudsman-Sebut-Jenjang...html	25-May
36	https://www.balisharing.com/2025/06/10/undiksha-gelar-seleksi-mandiri-daya-tampung-2-586-dipantau-ombudsman-bali/	10-Jun
37	https://www.nusabali.com/berita/194428/ombudsman-cek-seleksi-penerimaan-mahasiswa-baru-undiksha	11-Jun
38	https://beritabali.com/berita/202207046026/ombudsman-bali-kawal-ketat-seleksi-mandiri-undiksha	10-Jun
39	https://www.balipuspanews.com/dipantau-ombudsman-smbjm-cbt-undiksha-dipastikan-berjalan-ketat.html	11-Jun
40	https://pancarpos.com/26/06/2025/pengawasan-mandul-pelanggaran-hukum-wna-dibiarkan-laporan-masyarakat-diabaikan-kinerja-imigrasi-ngurah-rai-dan-ombudsman-ri-bali-dipertanyakan/	26-Jun
41	https://www.balipost.com/news/2025/07/09/471561/Ombudsman-Ingatkan-Potensi-Keluhan-SPMB...html	09-Jul

NO	LINK BERITA	TANGGAL PUBLISH
42	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-denpasar/baca-berita/38998/Field-Evaluation-oleh-Ombudsman-RI-Provinsi-Bali-Dukung-Persiapan-Penilaian-ZI-WBBM-KPKNL-Denpasar.html	24-Jul
43	https://www.balipost.com/news/2025/07/26/475386/Pembelian-Seragam-di-SMPN-10...html	26-Jul
44	https://www.balipost.com/news/2025/07/30/476402/Ombudsman-Terima-Aduan-SPMB-2025,...html	30-Jul
45	https://posmerdeka.com/ombudsman-bali-terima-sembilan-aduan-terkait-spmb-2025/	30-Jul
46	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-bali-temukan-dugaan-potensi-maladministrasi-di-smp-denpasar-terkait-pembelian-seragam-sekolah	29-Jul
47	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pembelian-seragam-di-smpn-10-denpasar-dikeluhkan-ortu-sebut-tak-ada-sosialisasi	29-Jul
48	https://www.nusabali.com/berita/198200/ori-bali-sebut-spmb-lebih-tertib	31-Jul
49	https://atnews.id/portal/news/26105/	01-Aug
50	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ori-bali-minta-pemerintah-menindaklanjuti-pelanggaran-wbd-jatiluwih-sesuai-sop-terapkan-sanksi-administratif-hingga-pidana	01-Aug
51	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-bali-dorong-pengawasan-ketat-sekolah-rakyat	06-Aug
52	https://rri.co.id/denpasar/daerah/1748293/ombudsman-bali-dorong-pengawasan-ketat-sekolah-rakyat	06-Aug
53	https://bali.antaranews.com/berita/389764/ombudsman-bali-minta-asn-lapor-jika-diintervensi-soal-donasi	23-Sep
54	https://www.detik.com/bali/nusra/d-8124931/ombudsman-minta-asn-pppk-lapor-jika-dipaksa-donasi-banjir-bali	22-Sep
55	https://www.suara.com/tekno/2025/09/23/131133/viral-pns-di-bali-diminta-donasi-bencana-banjir-ombudsman-segera-lapor	23-Sep
56	https://www.antaranews.com/video/5126616/ombudsman-bali-minta-pemprov-efektifkan-kanal-whistle-blower	22-Sep

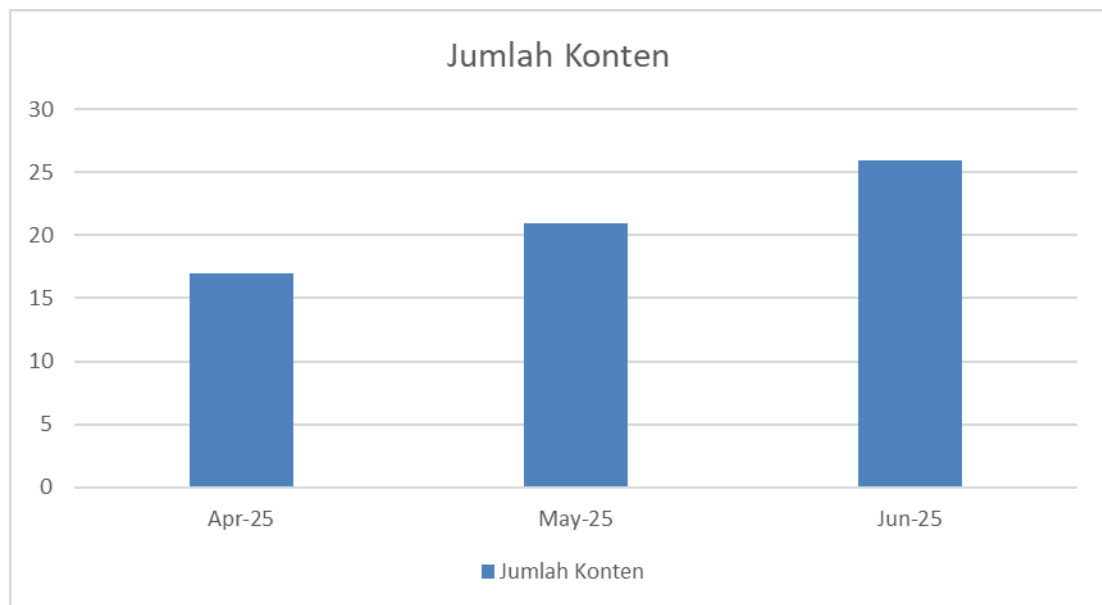
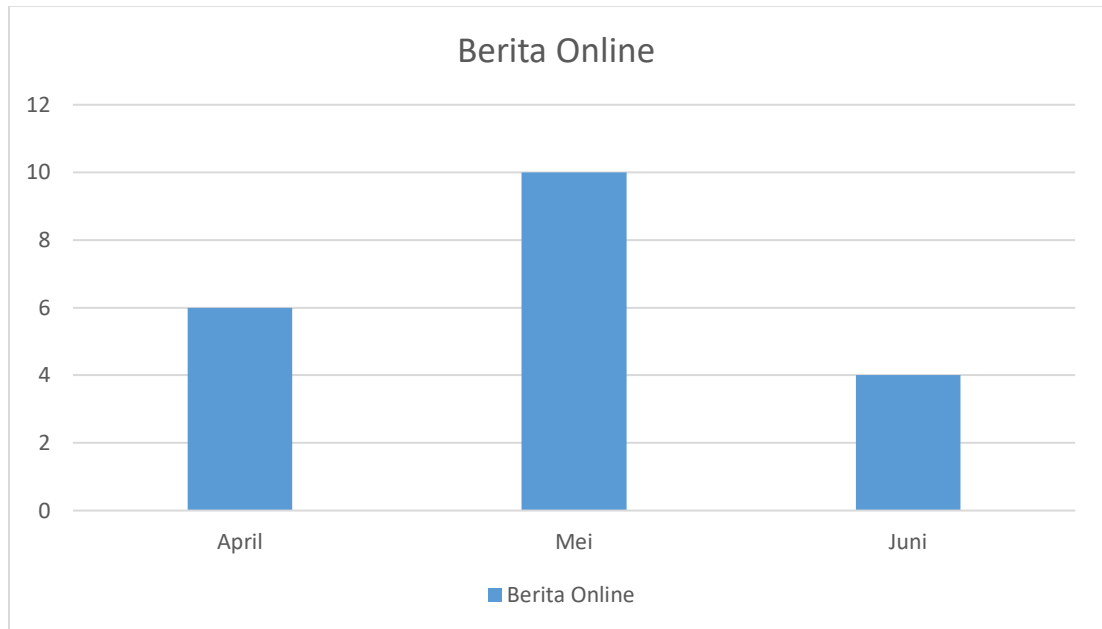
NO	LINK BERITA	TANGGAL PUBLISH
57	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-minta-asn-pppk-lapor-jika-dipaksa-donasi-banjir-bali	24-Sep
58	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-bali-minta-asn-lapor-jika-diintervensi-soal-donasi	24-Sep
59	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-bali-tinjau-sekolah-rakyat-17-tabanan-perhatikan-fasilitas-kesejahteraan-guru-dan-kebutuhan-siswa	22-Oct
60	https://baliwananews.com/ombudsman-bali-tinjau-sekolah-rakyat-17-tabanan-perhatikan-fasilitas-kesejahteraan-guru-dan-kebutuhan-siswa/	22-Oct
61	https://www.balinetizen.com/sekolah-rakyat-17-tabanan-dipantau-ombudsman-bali-soroti-kesejahteraan-guru-dan-fasilitas-sekolah/	22-Oct
62	https://metroali.co.id/ombudsman-bali-soroti-kekurangan-fasilitas-di-sekolah-rakyat-17-tabanan/	22-Oct
63	https://rri.co.id/denpasar/daerah/1920148/ombudsman-bali-pantau-sekolah-rakyat-tabanan	23-Oct
64	https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/bali-nusra/pr-889738050/ombudsman-bali-identitas-sekolah-rakyat-belum-banyak-diketahui-oleh-publik	23-Oct
65	https://www.antaranews.com/berita/5192589/ombudsman-bali-soroti-pemenuhan-hak-siswa-dan-guru-sekolah-rakyat	22-Oct
66	https://indonesia.jakartadaily.id/nasional/69316128452/ombudsman-bali-soroti-fasilitas-dan-hak-guru-siswa-sekolah-rakyat-tabanan	23-Oct
67	https://bali.idntimes.com/news/bali/tinjau-sekolah-rakyat-17-tabanan-ombudsman-ungkap-sarpras-yang-kurang-00-r544s-r84j2t	22-Oct
68	https://radarbali.jawapos.com/tabanan/706756032/tak-transparan-ombudsman-bali-tak-dilibatkan-seleksi-jabatan-pimpinan-tinggi-yang-diikuti-istri-bupati-tabanan	27-Oct
69	https://fajarbali.com/kantah-badung-terima-kunjungan-ombudsman-bali-untuk-penilaian-maladministrasi-pelayanan-publik/	31-Oct

NO	LINK BERITA	TANGGAL PUBLISH
70	https://ombudsman.go.id/news/r/pastikan-proses-penilaian-sesuai-standar-ombudsman-ri-lakukan-supervisi-penilaian-maladministrasi-di-rsd-mangusada-badung	04-Nov
71	https://sippn.menpan.go.id/berita/detail/ombudsman-ri-perwakilan-provinsi-bali-lakukan-penilaian-pelayanan-publik-di-bapas-denpasar	12-Nov
72	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-bali-lakukan-iaps-terhadap-pelayanan-pengesahan-pajak-kendaraan-tahunan	11-Dec

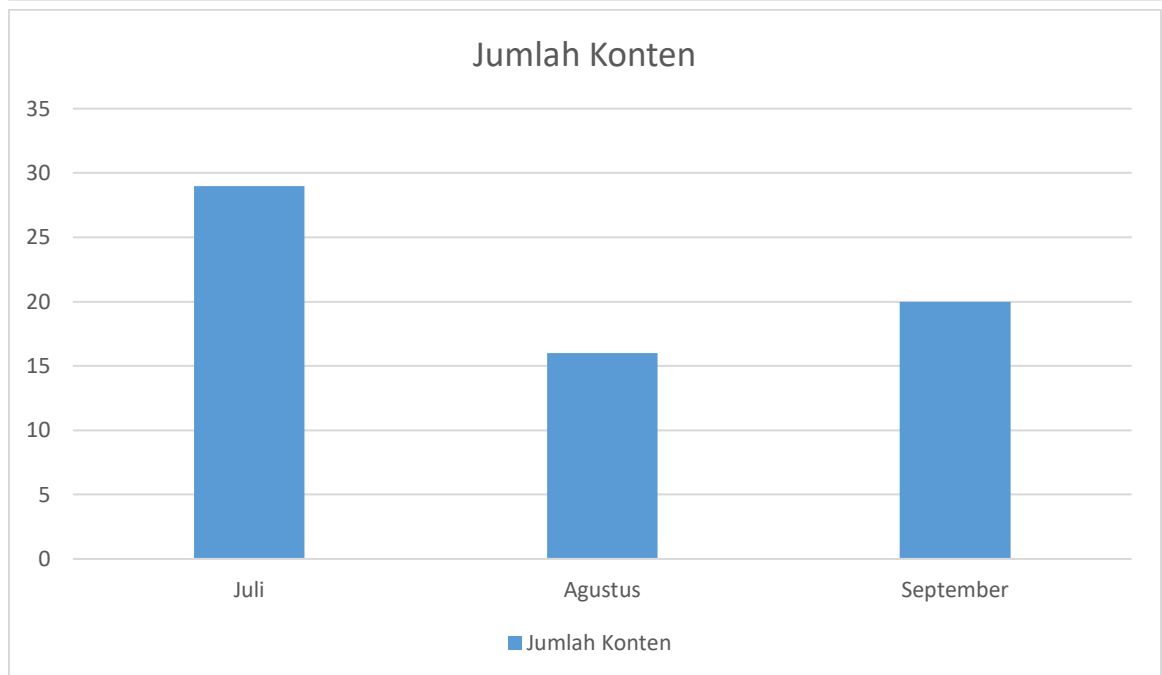
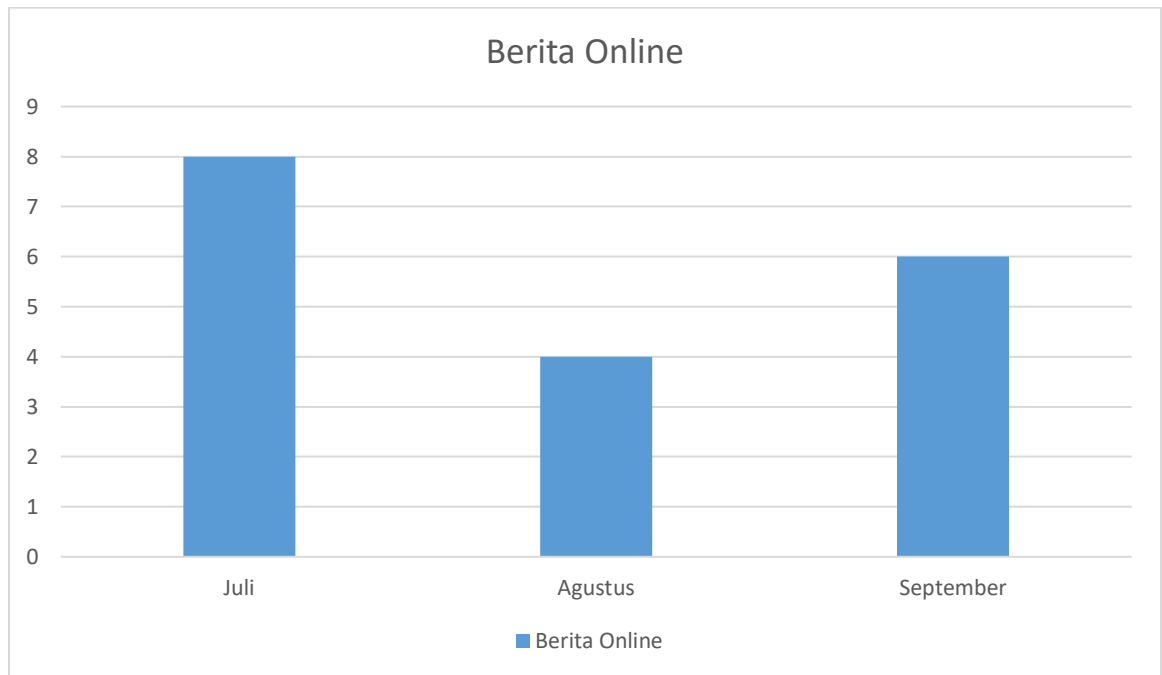
Matrik Pemberitaan Perwakilan dan Konten Media Online Triwulan I Tahun 2025



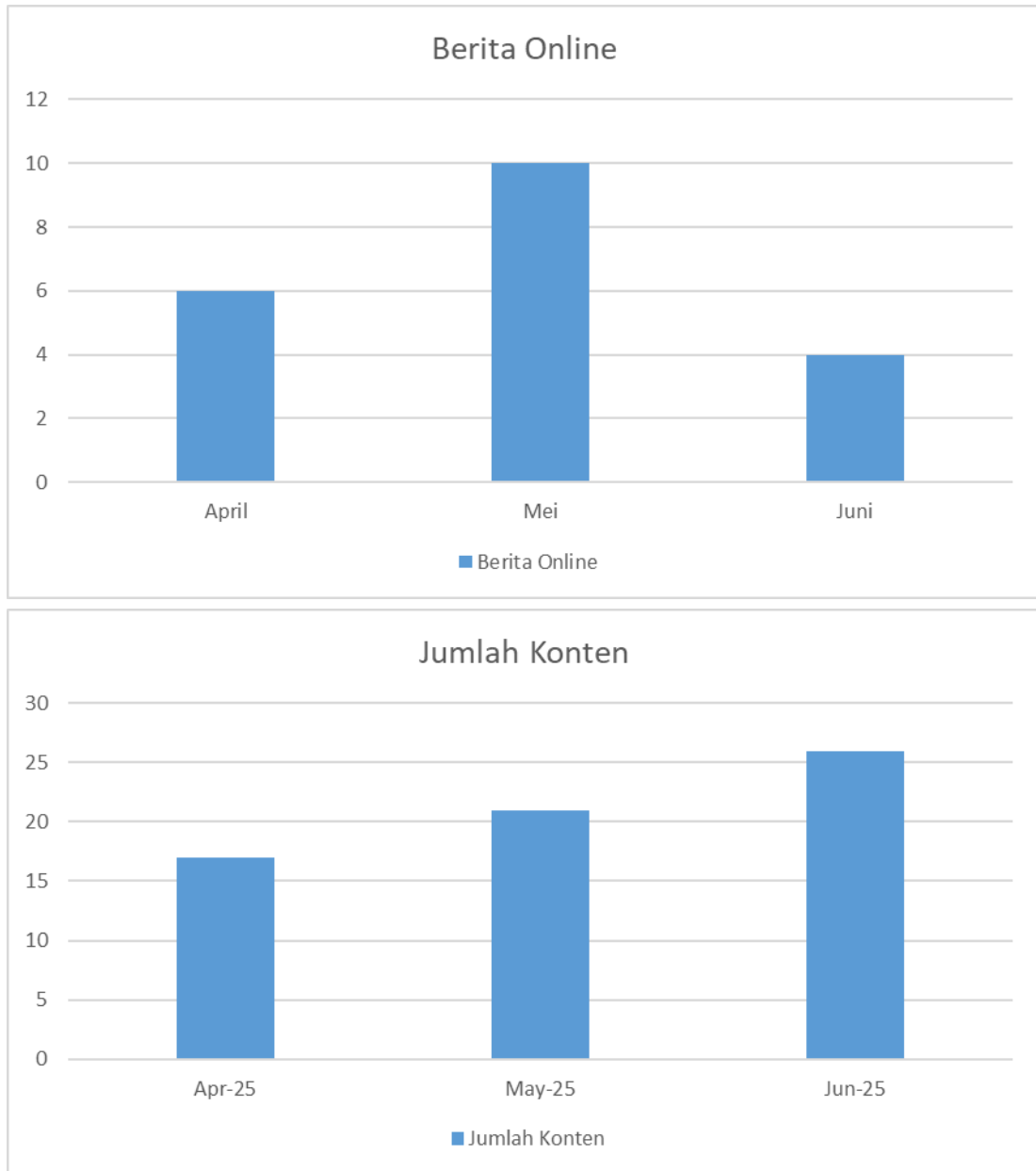
Matrik Pemberitaan Perwakilan dan Konten Media Online Triwulan II Tahun 2025



Matrik Pemberitaan Perwakilan dan Konten Media Online Triwulan III Tahun 2025



Matrik Pemberitaan Perwakilan dan Konten Media Online Triwulan IV Tahun 2025



3.3.2. Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam hal pelaksanaan koordinasi pengadaan barang/jasa di Perwakilan dapat disampaikan sebagai berikut:

- Dalam hal pelaksanaan koordinasi pengadaan barang/jasa di Perwakilan dapat disampaikan bahwa anggaran belanja modal pengadaan sarana dan prasarana perkantoran pada POK tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Realisasi pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan pada bulan Juni 2025 berupa pengadaan 2 unit AC 1 PK untuk ruangan kepala perwakilan dan ruangan keasistenan pemeriksaan laporan, 1 unit printer untuk ruangan keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan.

- Pada POK Revisi ke 08, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali mendapat tambahan anggaran belanja modal pengadaan sarana dan prasarana perkantoran hasil optimalisasi anggaran perwakilan sebesar Rp. 32.150.000,- sehingga anggaran belanja modal menjadi Rp. 42.150.000,-. Realisasi pengadaan sarana dan prasarana perkantoran pada tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 berupa pengadaan 2 unit AC 2 PK untuk ruangan rapat perwakilan, 2 unit laptop.

3.3.3. Laporan Realisasi Anggaran

Pada tanggal 6 Januari 2025, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali mendapat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1,123,517,000,-. Pada tanggal 24 Januari 2025 berdasarkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 228/PR.03.06-SJ/II/2025 Hal Penyampaian Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2025 Revisi 1, maka pelaksanaan kegiatan pada triwulan I rincian anggaran sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 1 sebesar Rp. 1,003.598,000,- dengan anggaran blokir sebesar Rp. 290.358,000,- sehingga pagu efektif anggaran sebesar Rp. 713.240,000,-. Kemudian Pada tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 32/PR.03.06/III/2025 Hal Penyampaian Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2025, maka pelaksanaan kegiatan pada triwulan I rincian anggaran sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 3 sebesar Rp. 1,003.598,000,- dengan anggaran blokir sebesar Rp. 637.879,000,- sehingga pagu efektif anggaran sebesar Rp. 365.719,000,-. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2025, mendapat anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 4 dengan anggaran total sebesar Rp. 1.003.598.000,- dan anggaran blokir sebesar Rp. 650.587.000,- sehingga pagu efektif anggaran sebesar Rp. 353.011.000,-. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2025, mendapat anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 6 dengan pembukaan blokir anggaran pagu efektif anggaran sebesar Rp. 617.851.127,-. Pada anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 8 dengan

pembukaan blokir anggaran pagu efektif anggaran sebesar Rp. 651.851.127,-
 Dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Riil POK		Jumlah Pagu Efektif	
Program Dukungan Manajemen		Rp.	442.495.000	Rp.	398.293.561
1	Belanja Modal Perwakilan	Rp.	42.150.000	Rp.	42.150.000
2	Belanja LTGA	Rp.	122.232.000	Rp.	104.849.000
3	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp.	50.390.000	Rp.	40.025.000
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp.	8.400.000	Rp.	3.690.000
5	Belanja Langganan Lisensi Zoom	Rp.	1.692.000	Rp.	1.692.000
6	Belanja Bahan Penggandaan dan Penjilidan	Rp.	650.000	Rp.	4.210.000
7	Belanja Barang Ekstrakomptabel	Rp.	4.000.000	Rp.	4.000.000
8	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	Rp.	29.100.000	Rp.	20.100.000
9	Belanja Perjalanan Kedinasan Perwakilan	Rp.	12.240.000	Rp.	3.084.000
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Rp.	20.800.000	Rp.	18.865.000
11	Belanja Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan	Rp.	8.000.000	Rp.	22.200.000
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.	85.390.000	Rp.	85.390.000
13	Belanja Operasional Kendaraan Dinas	Rp.	32.200.000	Rp.	22.020.000
14	Belanja Perjalanan Biasa	Rp.	42.458.000	Rp.	26.018.561

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Riil POK		Jumlah Pagu Efektif	
	Program Pengawasan Pelayanan Publik	Rp.	586.046.000	Rp.	253.557.566
Kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan					
1	Jaringan Pengawasan	Rp.	23.676.000	Rp.	9.967.596
2	Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot	Rp.	51.040.000	Rp.	8.404.535
3	Akselerasi PVL	Rp.	26.880.000	Rp.	24.420.000
Kegiatan Pemeriksaan Laporan					
1	Investigasi/ Monitoring/ Respon Cepat	Rp.	88.951.000	Rp.	58.803.000
2	Fasilitasi Konsiliasi	Rp.	26.734.000	Rp.	-
3	Rapat Penyelesaian Laporan	Rp.	63.230.000	Rp.	16.500.000
4	IAPS	Rp.	33.445.000	Rp.	14.080.345
Kegiatan Pencegahan Maladministrasi					
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp.	49.848.000	Rp.	22.028.208
2	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok	Rp.	23.700.000	Rp.	9.977.700
3	Workshop Survei Kepatuhan	Rp.	39.122.000	Rp.	-
4	Pengambilan Data Pemerintah Daerah	Rp.	159.420.000	Rp.	89.376.182

Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 633.834.601,- atau 97,24% dari Total Pagu Efektif Anggaran sebesar Rp. 651.851.127,- , dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Blokir	Efektif	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dukungan Manajemen	442.495.000	44.201.439	398.293.561	380.318.905	17.974.656	95,49%
2	Penerimaan dan Verifikasi Laporan	101.596.000	58.803.869	42.792.131	42.777.484	14.647	99,97%
3	Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat	212.360.000	122.976.655	89.383.345	89.380.730	2.615	100,00%
4	Pencegahan Maladministrasi	272.090.000	150.707.910	121.382.090	121.357.482	24.608	99,98%
Total		1.028.541.000	376.689.873	376.689.873	651.851.127	633.834.601	97,24%

o Program Dukungan Manajemen

No	Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi	%
1	Belanja Modal Perwakilan	42.150.000	41.531.000	98,53%
2	Belanja LTGA	104.849.000	91.567.320	87,33%
3	Belanja Keperluan Perkantoran	40.025.000	37.595.409	93,93%
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	3.690.000	2.805.730	76,04%
5	Belanja Langganan Lisensi Zoom	1.692.000	1.582.513	93,53%
6	Belanja Bahan Penggandaan dan Penjilidan	4.210.000	4.209.184	99,98%
7	Belanja Barang Ekstrakomptabel	4.000.000	3.875.000	96,88%

No	Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi	%
8	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	20.100.000	19.933.180	99,17%
9	Belanja Perjalanan Kedinasan Perwakilan	3.084.000	3.084.000	100,00%
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	18.865.000	18.624.000	98,72%
11	Belanja Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan	22.200.000	22.199.656	100,00%
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.390.000	85.294.520	99,89%
13	Belanja Operasional Kendaraan Dinas	22.020.000	21.999.002	99,90%
14	Belanja Perjalanan Biasa	26.018.561	26.018.391	100,00%
Total		398.293.561	380.318.905	95,49%

o Program Penerimaan dan Verifikasi Laporan

No	Kegiatan	Lokasi	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi	%
1	Jaringan Pengawasan	Kota dan Kabupaten	9.967.596	9.961.484	99,94%
2	Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot		8.404.535	8.396.000	99,90%
3	Akselerasi PVL		24.420.000	24.420.000	100,00%
Total			42.792.131	42.777.484	99,97%

o Program Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi	%
1	Investigasi Laporan Masyarakat	Kota dan Kabupaten	58.803.000	58.803.000	100,00%
2	Fasilitasi/ Konsiliasi	-	-	-	0,00%
3	Rapat Penyelesaian Laporan/ LAHP	-	16.500.000	16.500.000	100,00%
4	Investigasi Atas Prakarsa Sendiri	-	14.080.345	14.077.730	99,98%
Total			89.383.345	89.380.730	100,00%

o Program Pencegahan Maladministrasi

No	Kegiatan	Lokasi	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi	%
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	-	22.028.208	22.028.000	100,00%
2	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok	-	9.977.700	9.977.700	100,00%
3	Workshop Survei Kepatuhan	Kabupaten dan Kota	-	-	#DIV/0!
4	Pengambilan Data Pemerintah Daerah	-	89.376.182	89.351.782	99,97%
Total			121.382.090	121.357.482	99,98%

o Kinerja Revolving Perwakilan Tahun 2025

No	Bulan	Nominal (Rp)	%	Rekap Saldo (Rp)
Pagu Efektif T.A 2025				651.851.127
1	Januari	3.377.284	0,52%	3.377.284
2	Februari	3.402.777	1,04%	6.780.061
3	Maret	1.784.825	1,31%	8.564.886
4	April	38.609.948	7,24%	47.174.834
5	Mei	1.934.383	7,53%	49.109.217
6	Juni	44.719.134	14,39%	93.828.351
7	Juli	2.753.557	14,82%	96.581.908
8	Agustus	28.637.717	19,21%	125.219.625
9	September	35.766.849	24,70%	160.986.474
10	Oktober	132.823.370	45,07%	293.809.844
11	November	76.993.767	56,88%	370.803.611
12	Desember	263.030.990	97,24%	633.834.601

o Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

A. Kendala

Adapun beberapa kendala yang kami temui dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran membuat tertundanya pelaksanaan kegiatan baik kegiatan operasional maupun kegiatan substansi;
2. Peralatan kerja berupa peralatan elektronik seperti komputer, printer, scanner dan beberapa ac ruangan memiliki umur penggunaan lebih dari 5 tahun dan sudah sering rusak, sehingga perlu pembaharuan, namun terbatas pada anggaran belanja modal yang tersedia;
3. Peralatan kerja untuk calon asisten berupa laptop tidak mendapatkan dari pengadaan Pusat;
4. Tidak optimalnya anggaran substansi mengenai penyelesaian laporan masyarakat dikarenakan buka blokir anggaran yang dilakukan akhir tahun;
5. Adanya Pelapor maupun Terlapor yang sulit dilakukan pemeriksaan;
6. Terdapat kendala dalam pencapaian target laporan dengan menurunnya jumlah laporan masyarakat yang diterima karena kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pengaduan;
7. Adanya blokir anggaran membuat Keasistenan PVL kesulitan untuk melaksanakan PVL *On The Spot*;
8. Adanya Pelapor maupun Terlapor yang sulit dilakukan pemeriksaan;
9. Kegiatan pencegahan belum bisa terlaksana sepenuhnya karena adanya efisiensi anggaran;
10. Kegiatan pendampingan ke pemerintah daerah dan K/L sampai saat ini belum masuk dalam POK

B. Solusi

Terhadap permasalahan diatas, maka ada beberapa solusi yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan terkait dianggarkannya kembali tanpa adanya blokir anggaran substansi mengenai penyelesaian laporan masyarakat;
2. Meningkatkan publikasi keberhasilan penyelesaian laporan untuk meningkatkan kepercayaan publik;
3. Menyampaikan pemahaman kepada Pelapor maupun Terlapor terkait kewenangan Ombudsman;
4. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama kepada focalpoint di Lembaga/Instansi dalam menangani pengaduan masyarakat;
5. Permohonan relaksasi efisiensi anggaran terutama pada anggaran kegiatan substansi;
6. Permohonan penambahan anggaran belanja modal berupa pengadaan 4 unit ac ruangan dan 2 unit laptop untuk calon asisten dilakukan dengan melakukan revisi realokasi anggaran semester 2;
7. Rencana pembaharuan sarana dan prasarana kerja sudah dilakukan dengan mengirimkan daftar prioritas pengadaan sarana dan prasarana;
8. Adanya kebijakan terkait dianggarkannya kembali substansi mengenai penyelesaian laporan masyarakat;
9. Adanya kebijakan terkait dianggarkannya kembali anggaran substansi mengenai penyelesaian Laporan Masyarakat;
10. Adanya relaksasi anggaran pada substansi keasistenan pencegahan sehingga seluruh target kinerja dapat segera terealisasi;
11. Meningkatkan publikasi keberhasilan penyelesaian laporan untuk meningkatkan kepercayaan public;
12. Menyampaikan pemahaman kepada Pelapor maupun Terlapor terkait kewenangan Ombudsman;
13. Seluruh petunjuk teknis kegiatan segera disahkan sehingga kegiatan dapat segera direalisasikan;

C. Saran

1. Adanya kebijakan terkait dianggarkannya kembali substansi mengenai penyelesaian laporan Masyarakat;
2. Meningkatkan publikasi keberhasilan penyelesaian laporan untuk meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan target publik saat ini, baik melalui media sosial maupun Upaya cara respon cepat yang minim birokrasi internal;
3. Adanya pelatihan bagi Asisten Pemeriksa, khususnya dalam penanganan substansi laporan tertentu, seperti Kepolisian, Agraria dan Adat;
4. Menyampaikan pemahaman kepada Pelapor maupun Terlapor terkait kewenangan Ombudsman;
5. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama kepada focalpoint di Lembaga/Instansi dalam menangani pengaduan masyarakat;